



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF



Délima

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat, bimbingan, dan karunia-Nya, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat menyelesaikan program dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan ini merupakan hasil capaian target dan realisasi pelaksanaan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan ini juga merupakan salah satu amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari Sekretariat Deputi dan 5 Asisten Deputi, yaitu Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini tidak lepas dari bantuan pihak terkait. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terkait atas bantuannya dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan laporan kinerja ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih ada kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan masukkan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2023
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif,

Ttd.

Odo R.M. Manuhutu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	1
BAB I - PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
BAB II – RENCANA KINERJA	7
2.1 Sasaran Strategis	7
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja	9
2.3 Penghitungan Capaian Kinerja	11
2.3 Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja	14
3.1.1 <i>Stakeholder Perspective</i>	14
SS.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	14
3.1.2 <i>Costumer Perspective</i>	19
SS.2 Terwujudnya Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	19
SS.3 Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	22
SS.4 Tingkat Ketersediaan Permodalan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif ²³	
SS.5 Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25
SS.6 Jumlah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	27
3.1.3 <i>Internal Business Perspective</i>	29
SS.7 Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ²⁹	
3.1.3 <i>Learn and Growth Perspective</i>	60

SS.8 Tersedianya SDM Yang Kompeten Di Deputi Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	60
SS.9 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	62
SS.10 Terlaksananya Administrasi Keuangan Yang Akuntabel Di Deputi Bidang	64
3.2 Realisasi Anggaran	65
BAB IV - PENUTUP	66
BAB V – DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	4
Gambar 2. Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif8	
Gambar 3. Statistik Perkembangan Pariwisata Indonesia Periode Oktober 2022....	15
Gambar 4. Transaksi Berjalan Jasa Perjalanan	16
Gambar 5. Kontribusi Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku	17
Gambar 6. Perbandingan Komitmen dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Negeri oleh K/L dan Pemda	18
Gambar 7. Perbandingan Komitmen dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Negeri oleh 84 perusahaan (BUMN + anak perusahaan)	18
Gambar 8. Progres Penyelesaian 101 Isu Pengembangan 5 DPSP	19
Gambar 9. Perkembangan 3 Isu Utama Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Semester I Tahun 2022	20
Gambar 10. Perbandingan Indeks Quality Tourism Per Aspek	21
Gambar 11. 3 Isu Utama Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Semester II Tahun 2022.....	21
Gambar 12. Konsep Pembangunan Creative Hub Labuan Bajo di Puncak Waringin	22
Gambar 13. Virtual GerNas BBI Expo di Surabaya.....	23
Gambar 14. Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha pada Triwulan IV Tahun 2022.....	25
Gambar 15. Konsep Cetak Biru Edukasi, Penciptaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan KI dalam RAN KKI.....	26
Gambar 16. Negara Penyumbang Lapangan Pekerjaan Sektor Pariwisata Tertinggi Tahun 2014-2019 (Dalam Juta)	28
Gambar 17. Penilaian Indeks Quality Tourism Destinasi Pariwisata Indonesia (Skala 1-100).....	30
Gambar 18. Hasil Telaah Usulan Anggaran.....	32
Gambar 19. Hasil Telaah Usulan Anggaran Berdasarkan Jenis Komponen Kegiatan	32
Gambar 20. Rencana Awal Penataan Kawasan Penyelenggaraan F1H2O	34
Gambar 21. Rencana Aksi Pengembangan Program ISUTW.....	40

Gambar 22. Linimasa Pengelolaan Aset di 5 DPSP	53
Gambar 23. UGGp Youth Forum Seminar and Camp.....	57
Gambar 24. Grafik Nilai Assesment Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	61
Gambar 25. Rincian Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022.....	62
Gambar 26. Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi.....	63
Gambar 27. Perkembangan Penilaian PMPRB Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	63
Gambar 28. Perkembangan Penilaian SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	64
Gambar 29. Hasil Penilaian IKPA Unit Kerja Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	64
Gambar 30. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	65
Gambar 31. Rincian Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	65
Gambar 32. Rincian Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022	9
Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022.....	11
Tabel 3. Total Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2022.....	13
Tabel 4. Capaian dan Target Indikator Pariwisata	29
Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan GerNas BBI 2022	52
Tabel 6. Nilai Assesment Pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.....	61
Tabel 7. Capain Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman.

Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri Sekretariat Deputy dan 5 Asisten Deputy, yaitu; Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Asisten Deputy Pengembangan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Asisten Deputy Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Asisten Deputy Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam mencapai tujuannya, seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur dengan indikator kinerja (IK) yang dirinci sesuai target sesuai waktu yang ditetapkan. Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2020, unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS), yang dijabarkan dalam 15 (lima belas) indikator kinerja (IK).

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan capaian kinerja atas target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam mendukung peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

1.2 Tugas dan Fungsi

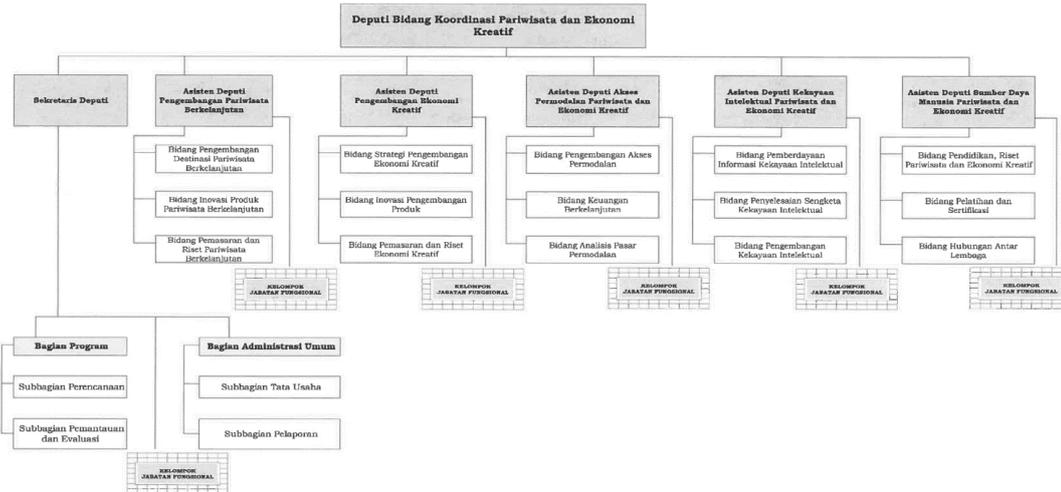
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

1. Sekretariat Deputi;
2. Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
6. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran dan capaian kinerja;
 - c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
 - d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;
 - e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
 - f. koordinasi penyusunan laporan; dan
 - g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

- Asisten Deputy Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pariwisata berkelanjutan serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset

- pariwisata berkelanjutan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, inovasi produk pariwisata berkelanjutan, serta pemasaran dan riset pariwisata berkelanjutan.
- Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif;
 - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pengembangan produk, serta pemasaran dan riset ekonomi kreatif.
 - Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang akses permodalan pariwisata dan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan;
 - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta analisis pasar permodalan; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan akses permodalan, keuangan berkelanjutan, serta

analisis pasar permodalan.

- Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual;
 - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan informasi kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, serta pengembangan kekayaan intelektual.

- Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif serta memiliki fungsi, yaitu:
 - a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga;
 - b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pendidikan, riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan dan riset pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan dan sertifikasi, serta hubungan antar lembaga.

BAB II

RENCANA KINERJA

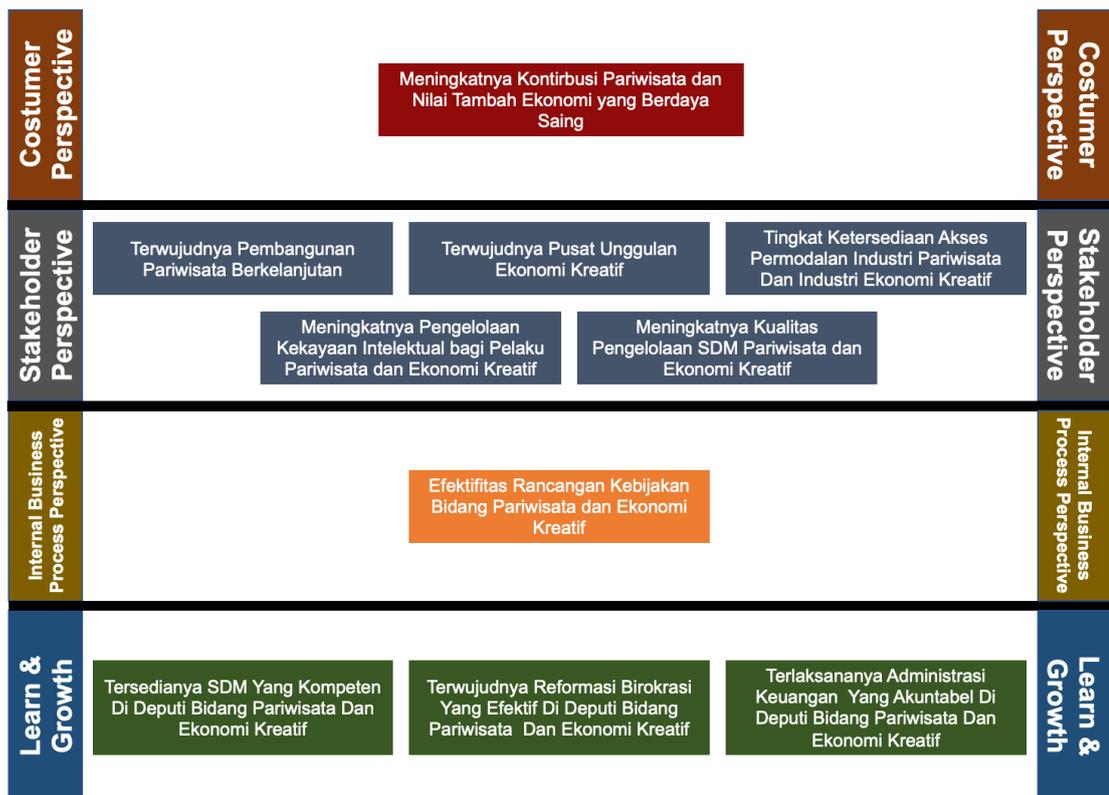
2.1 Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan
2. Terwujudnya pusat unggulan ekonomi kreatif
3. Terwujudnya ketersediaan akses permodalan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif
4. Terwujudnya perlindungan dan nilai keekonomian atas kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif

Perencanaan Strategis pada prinsipnya merencanakan kondisi akhir (visi, tujuan dan sasaran) dan cara mencapai kondisi akhir (misi, strategi dan program) serta indikator keberhasilannya. Untuk menjelaskan hubungan antara kondisi akhir dan cara mencapai kondisi akhir dengan indikator keberhasilannya tersebut digambarkan dalam bentuk peta strategis. Pencapaian sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggunakan pendekatan *Balance Score Card* (BSC) dan digambarkan dalam peta strategis sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Peta strategis Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi sasaran strategis ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*) menggambarkan pencapaian tujuan;
2. perspektif pengguna (*customer perspective*) menggambarkan pencapaian sasaran strategis
3. perspektif proses bisnis internal (*internal bussines process perspective*) menggambarkan pencapaian kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran; dan
4. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*) menggambarkan pencapaian penguatan sumberdaya dan aspek penunjang tugas lainnya.



Gambar 2. Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peta strategi ini memfokuskan pada pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan melalui satu sasaran strategis utama, yaitu “Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Nilai Tambah Ekonomi yang Berdaya Saing”. Adapun seluruh sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022 terdapat pada tabel dibawah ini:

Sasaran Program	
<i>Stakeholder Perspective</i>	
SS1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Nilai Tambah Ekonomi yang Berdaya Saing
<i>Costumer Perspective</i>	
SS2	Terwujudnya Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
SS3	Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif
SS4	Tingkat Ketersediaan Akses Permodalan Industri Pariwisata Dan Industri Ekonomi Kreatif
SS5	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SS6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
<i>Internal Business Perspective</i>	
SS7	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
<i>Learn and Growth Perspective</i>	
SS8	Tersedianya SDM Yang Kompeten Di Deputi Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
SS9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Efektif Di Deputi Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
SS10	Terlaksananya Administrasi Keuangan Yang Akuntabel Di Deputi Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022

2.2 Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama yang dibagi dalam 4 Perspektif. Adapun PK Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Program		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan
<i>Stakeholder Perspective</i>			
SS1	Meningkatnya kontribusi ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	USD 3 Miliar
		Tingkat Kontribusi PDB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3%
		Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga dan Pemda	Rp.400 T
<i>Costumer Perspective</i>			

SS2	Terwujudnya Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Tata Kelola Pariwisata	5
SS3	Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	5
SS4	Tingkat Ketersediaan Akses Permodalan Industri Pariwisata Dan Industri Ekonomi Kreatif	Nilai Penanaman Modal Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.30 Triliun
SS5	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tata Kelola Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3
SS6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tata Kelola SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5
<i>Internal Business Perspective</i>			
SS7	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat Rancangan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	70%
<i>Learn and Growth Perspective</i>			
SS8	Tersedianya SDM Yang Kompeten Di Deputi Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Tingkat Kompetensi SDM Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	75%
SS9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Efektif Di Deputi Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Tingkat Pelaksanaan PMPRB di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70%
		Nilai Evaluasi Internal SAKIP di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	70
SS10	Terlaksananya Administrasi Keuangan Yang Akuntabel Di Deputi Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Nilai IKPA di Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	90

Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022

2.3 Penghitungan Capaian Kinerja

1. IKU 1. Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
2. IKU 2. Persentase Kontribusi PDB Pariwisata diukur berdasarkan kontribusi setiap sektor pada PDB Indonesia. Data diambil dari laporan triwulanan perekonomian Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
3. IKU 3. Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga dan Pemda diukur berdasarkan data realisasi PDN yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
4. IKU 4. Jumlah Tata Kelola Pariwisata diukur berdasarkan jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pada destinasi pariwisata dan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
5. IKU 5. Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pembangunan *creative hub* yang menjadi pusat ekonomi kreatif di setiap DPSP.
6. IKU 6. Nilai Penanaman Modal Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan tingkat penanaman modal asing dan dalam negeri pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diambil dari BPS.
7. IKU 7. Jumlah Tata Kelola Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam upaya pengelolaan dan pengembangan tata Kelola kekayaan intelektual pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.
8. IKU 8. Jumlah tata Kelola SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam upaya pengelolaan dan pengembangan tata Kelola SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, terutama di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
9. IKU 9. Tingkat Rancangan Kebijakan yang Ditindaklanjuti diukur berdasarkan jumlah rencana rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti

untuk diterbitkan.

10. IKU 10. Tingkat Kompetensi SDM Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan dari perbandingan antara Jumlah SDM pada Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah memenuhi kompetensi dengan total Jumlah SDM pada Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kompetensi yang dimaksud adalah yang disesuaikan antara latar pendidikan dengan jabatan yang diduduki.
11. IKU 11. Tingkat Pelaksanaan PMPRB di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan capaian nilai bobot yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB dibagi dengan total nilai bobot pada LKE PMPRB.
12. IKU 12. Nilai Evaluasi Internal SAKIP di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan penilaian SAKIP dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
13. IKU 13. Nilai IKPA di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan penilaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan indikator penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, kesalahan SPM dan retur SP2D.

2.3 Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 17 November 2021 adalah sebesar Rp. 15.724.295.000.

Selanjutnya berdasarkan kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, hingga Akhir 2022 Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami dua kali *Automatic Adjustment*. Adapun pagu akhir Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebesar Rp13.661.698.000. Rincian detail persebaran anggaran unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Unit	Pagu
1	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.929.732.000
2	Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Rp 2.111.426.000
3	Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 2.103.694.000
4	Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.770.929.000
5	Asisten Deputi Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.752.952.000
6	Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.747.330.000
7	RO Lintas Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 2.245.635.000
Total Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2022		Rp13.661.698.000

Tabel 3. Total Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif T.A. 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana/target kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2022. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Pengukuran kinerja tersebut dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Hasil penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan dan menghitung secara matematis yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

3.1 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan hasil perbandingan antara target capaian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang disajikan dalam bentuk persentase. Target capaian kinerja merupakan satuan yang dijadikan target dari Indikator Kinerja (IK). Sementara itu, Indikator Kinerja (IK) merupakan ukuran untuk menggambarkan tujuan utama dari Sasaran Strategis (SS) Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK).

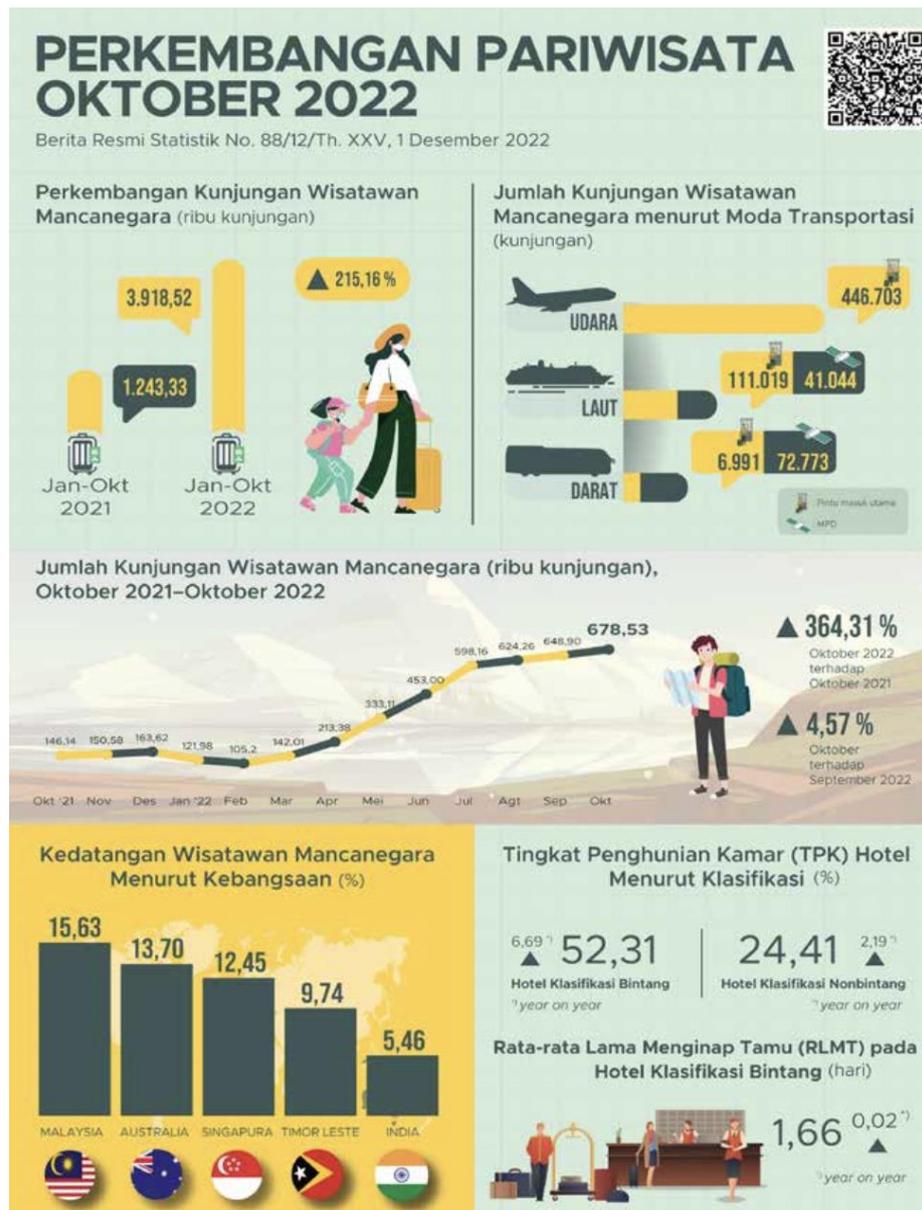
3.1.1 *Stakeholder Perspective*

SS.1 Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing

Sasaran Strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif yang berdaya saing untuk meningkatkan ekonomi Indonesia dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sasaran strategis ini diukur berdasarkan tiga indikator kerja utama (IKU), yaitu (i) Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan target USD 3 Miliar, (ii) Tingkat Kontribusi PDB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan target persentase kontribusi sebesar 3%, dan (iii) Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan target nilai belanja sebesar Rp 400 triliun.

IKU “Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif” dengan target USD 3 Miliar diambil berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara (BPS) dan transaksi berjalan perjalanan (BI). Sementara itu, untuk itu devisa ekonomi kreatif diambil berdasarkan nilai ekspor produk ekonomi kreatif. Berdasarkan data dari Kemenparekraf, nilai ekspor ekonomi kreatif adalah sebesar 24,79 miliar USD hingga November 2022.

Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022 adalah sebanyak 3,92 juta kunjungan. Jumlah tersebut naik sebesar 215,16% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode yang sama tahun 2021. Adapun mayoritas wisatawan mancanegara masuk melalui empat pintu masuk utama, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Batam, dan Tg. Uban.



Gambar 3. Statistik Perkembangan Pariwisata Indonesia Periode Oktober 2022

Sumber: Berita Resmi Statistik Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional BPS, 2022

Berdasarkan data transaksi berjalan jasa perjalanan pada Laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Desember 2022 oleh Bank Indonesia, sampai dengan akhir kuartal III Tahun 2022 Indonesia mendapatkan pendapatan negara mencapai 171 Juta USD. Nilai ini didapatkan dari perjalanan ekspor (menuju Indonesia) sebesar 2.414 Juta USD ditambah dengan perjalanan impor (keluar Indonesia) sebesar -2.243 Juta USD. Nilai perjalanan impor menunjukkan bahwa terdapat pendanaan dari pemerintah atau subsidi yang digunakan untuk membiayai wisatawan keluar Indonesia.

KETERANGAN	2022		
	Q1*	Q2*	Q3**
Jasa-jasa	-4.377	-4.942	-5.273
D. Perjalanan	-88	179	171
- Ekspor	218	1.626	2.414
- Impor	-306	-1.447	-2.243

Gambar 4. Transaksi Berjalan Jasa Perjalanan

Sumber: Laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Desember 2022, Bank Indonesia

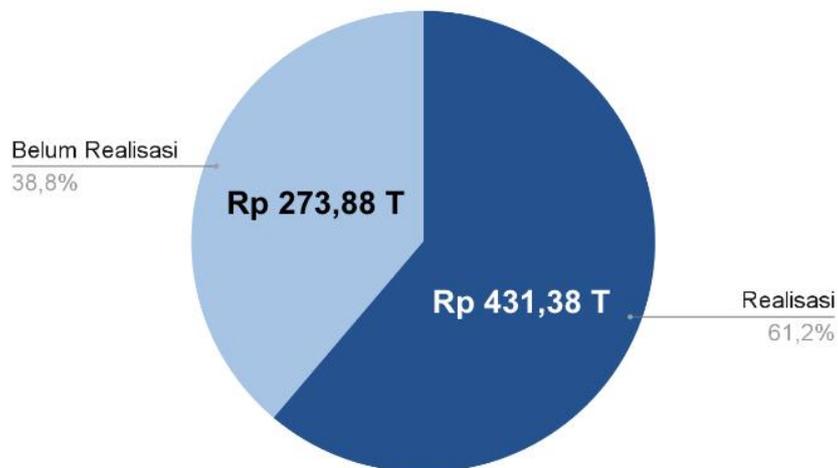
IKU “Tingkat Kontribusi PDB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif” dengan target target persentase kontribusi sebesar 3%, diambil dari data Bank Indonesia tentang Kontribusi Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku. Adapun untuk menentukan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif diambil pada lapangan usaha jenis “Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum”. Pada sektor tersebut didapatkan nilai kontribusi sebesar Rp 472,1 triliun per kuartal IV tahun 2022, sementara itu nilai PDB dari seluruh lapangan usaha adalah sebesar Rp 19.588,4 triliun. Sehubungan dengan hal tersebut, nilai kontribusi lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sebesar 2,41%.

Lapangan Usaha	Harga Berlaku		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.115,5	2.254,5	2.428,9
B. Pertambangan dan Penggalian	993,5	1.523,7	2.393,4
C. Industri Pengolahan	3.068,0	3.266,9	3.591,8
D. Pengadaan Listrik dan Gas	179,7	190,1	204,7
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,3	12,0	12,5
F. Konstruksi	1.652,7	1.771,7	1.913,0
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.994,0	2.199,9	2.516,6
H. Transportasi dan Pergudangan	689,5	719,6	983,5
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	394,0	412,3	472,1
J. Informasi dan Komunikasi	696,0	748,8	812,8
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	696,1	736,2	809,3
L. Real Estat	453,8	468,2	488,3
M,N. Jasa Perusahaan	294,3	301,1	341,4
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	586,0	586,7	605,1
P. Jasa Pendidikan	551,2	557,7	566,6
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201,5	227,2	236,2
R,S,T,U. Jasa Lainnya	302,6	312,2	354,2
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	14.879,7	16.288,8	18.730,4
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	563,7	687,9	858,0
Produk Domestik Bruto (PDB)	15.443,4	16.976,7	19.588,4

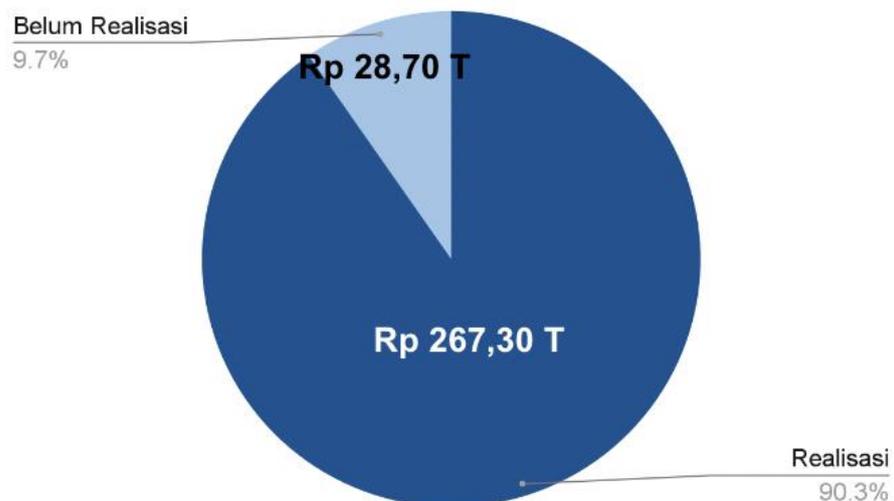
Gambar 5. Kontribusi Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Sumber: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia TW IV 2022, BPS

Lebih lanjut, IKU “Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga dan Pemda” dengan target nilai belanja sebesar Rp 400 triliun diambil dari data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Nilai belanja yang telah terealisasi adalah sebesar Rp 430,65 triliun atau telah mencapai 107% dari nilai yang ditargetkan. Besaran tersebut merupakan hasil realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga dan Pemda. Sementara itu, target belanja produk dalam negeri oleh 85 perusahaan (BUMN + anak perusahaan) adalah sebesar Rp 296 triliun dan sudah terealisasi sebesar Rp 332,1 triliun atau sebesar 112,19% dari nilai yang ditargetkan.



Gambar 6. Perbandingan Komitmen dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Negeri oleh K/L dan Pemda
 Sumber: *Dashboard PDN, LKPP, diolah*



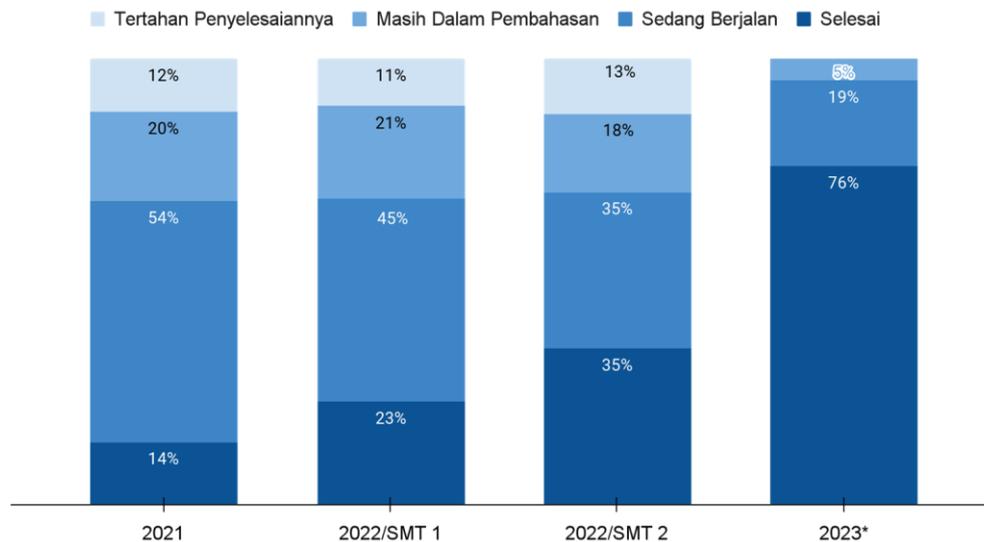
Gambar 7. Perbandingan Komitmen dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Negeri oleh 84 perusahaan (BUMN + anak perusahaan)
 Sumber: *Dashboard PDN, LKPP, diolah*

3.1.2 Costumer Perspective

SS.2 Terwujudnya Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Sasaran strategis bertujuan untuk menciptakan pembangunan di destinasi pariwisata yang berorientasi kepada pariwisata berkelanjutan, sehingga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat dan Indonesia. Adapun IKU yang terdapat pada sasaran strategis ini adalah jumlah tata kelola pariwisata dengan target 5 tata kelola di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dilakukan melalui penguatan aksesibilitas dan amenitas, pengembangan *ancillary*, dan pengembangan atraksi di kelima DPSP tersebut.

Sepanjang 2022, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan penyelesaian 101 isu pengembangan DPSP yang dikumpulkan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada akhir 2020 dan ditambah dengan 19 isu tambahan. Adapun isu yang telah selesai meningkat dari 23% menjadi 35%, namun isu yang tertahan juga meningkat dari 11% menjadi 13%. Secara umum, kendala yang dihadapi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah terkait pembebasan lahan dan lingkungan.



Gambar 8. Progres Penyelesaian 101 Isu Pengembangan 5 DPSP

Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah melakukan pemetaan 3 (tiga) isu utama di masing-masing DPSP yang harus diselesaikan pada akhir 2022. Adapun ketiga isu tersebut

merupakan hasil pemetaan Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Semester I Tahun 2022. Sampai dengan 2022, 1 isu utama telah selesai, 11 isu sedang berjalan, dan 3 isu masih dalam pembahasan. Secara keseluruhan, terdapat 3 isu penting yang perlu segera ditangani, yaitu:

- a. infrastruktur dasar di lahan otorita terhambat keterbatasan anggaran dan payung hukum. Untuk itu diusulkan agar pembangunan pada lahan otorita masuk pada revisi Perpres 120 tahun 2022;
- b. percepatan penyelesaian dokumen perencanaan pariwisata yang terintegrasi atau RIPDN; dan
- c. keberlanjutan penggunaan TOMPS untuk monitoring pengembangan 5 DPSP.

DPSP	3 Isu Utama Semester 1 2022	Status
Danau Toba	1. Persiapan penyelenggaraan balap F1 <i>powerboat</i>	
	2. Percepatan investasi di lahan otorita Danau Toba	
	3. Pembangunan infrastruktur dasar di lahan otorita Danau Toba	
Borobudur	1. Pengelolaan kawasan Borobudur	
	2. Penyelesaian dokumen <i>Heritage Impact Assessment</i>	
	3. Penerapan pengaturan dan penyebaran pengunjung	
Mandalika	1. Penyelesaian jalan Kuta - Keruak	
	2. Percepatan relokasi warga terdampak ke Dusun Ngolang	
	3. Pengembangan desa wisata di kawasan Mandalika	
Labuan Bajo	1. Penyelesaian isu lahan di Labuan Bajo	
	2. Penyelesaian pembangunan akses jalan dan kawasan otoritatif	
	3. Pengelolaan aset KSPN di Labuan Bajo	
Likupang	1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Pulau Bangka	
	2. Pengembangan atraksi wisata dan <i>event</i> di DPSP Likupang	
	3. Pengelolaan sampah di DPSP Likupang	

■ selesai ■ sedang berjalan ■ dalam pembahasan

Gambar 9. Perkembangan 3 Isu Utama Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Semester I Tahun 2022

Berdasarkan penilaian *quality tourism* terhadap 51 parameter dengan 107 indikator dari Bank Indonesia, menunjukkan bahwa terdapat 4 DPSP yang berada dibawah nilai rerata. Hal ini perlu dijadikan prioritas, sehingga Indonesia dapat menempati kisaran peringkat 20-an pada TTDI 2024.

Aspek Pariwisata Berkualitas	Daya Saing Dasar	Pengelolaan Berkelanjutan	Pengalaman Unik	Nilai Tambah Berkualitas
Danau Toba	4.1	2.6	5.6	3.8
Borobudur	4.3	4.3	6.0	4.3
Labuan Bajo	4.2	3.0	6.2	4.0
Mandalika	4.1	3.3	5.6	3.7
Likupang	4.1	2.4	5.8	3.9
Nusa Dua	6.2	6.8	6.0	5.8

Gambar 10. Perbandingan Indeks Quality Tourism Per Aspek Sumber: Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata & Bappenas (2022)

Pada 2023, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah memetakan 3 isu utama di masing-masing DPSP yang perlu diselesaikan pada akhir 2023. Adapun ketiga isu tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Semester II Tahun 2022.

No	DPSP	Isu utama 2023
1.	Danau Toba	1. Pembangunan infrastruktur di lahan otorita BPODT 2. Percepatan investasi di lahan otorita BPODT 3. Percepatan pembangunan Bandara Sibisa
2.	Borobudur	1. Integrasi pengelolaan kawasan Borobudur (optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan zona 3, 4, dan 5) 2. Pengaturan pengunjung ke Kawasan Borobudur 3. Percepatan pengembangan lahan otorita BPOB
3.	Mandalika	1. Pengembangan 7 desa wisata di kawasan Mandalika 2. Pengembangan kapasitas usaha kecil menengah di 7 desa wisata 3. Penanganan isu sedimentasi
4.	Labuan Bajo	1. Percepatan pengembangan lahan otorita BPOLBF 2. Percepatan investasi di DPSP Labuan Bajo 3. Percepatan pengembangan SDM dan tata kelola pariwisata
5.	Likupang	1. Percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Bangka 2. Pengembangan atraksi wisata dan pelaksanaan event 3. Pengembangan SDM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

Gambar 11. 3 Isu Utama Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Semester II Tahun 2022

SS.3 Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif

Sasaran strategis bertujuan untuk membangun pusat pengembangan (*creative hub*) ekonomi kreatif di 5 DPSP, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Pembangunan *creative hub* di DPSP Labuan Bajo dan Borobudur, tepatnya di Puncak Waringin dan Kota Lama Semarang sudah selesai



Gambar 12. Konsep Pembangunan Creative Hub Labuan Bajo di Puncak Waringin

Pembangunan *creative hub* di DPSP Danau Toba, tepatnya di Kabupaten Samosir masih tahap proses penandatanganan dokumen legalitas. Konsultan perencana akan ditunjuk untuk pembuatan design pada *creative hub* dan akan menyusun DED, RAB, serta RKS. Bappeda Samosir juga menawarkan alternatif pilihan lokasi lain yang sudah dibebaskan, dan BPODT juga menawarkan lokasi alternatif di Parapat dan Sibisa.

Rencana pembangunan *creative hub* di Manado dan Mandalika masih dalam proses koordinasi dengan calon penerima atau pengelola dan K/L terakit penentuan lokasi *creative hub*. PT ITDC memiliki lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan *creative hub* di Mandalika dengan infrastruktur (jalan, akses, air, dan listrik) yang sudah tersedia. Selain itu konsep pembangunan juga sudah ada tema Pasar Seni yang bersifat sebagai wadah atau sarana komunitas seni. Sekretaris Daerah Manado sedang membahas penentuan lokasi pembangunan *creative hub* di Manado. Ada dua lokasi yang di tahap diskusi yaitu Souvenir Shop yang terletak di Teluk Manado dan PT MRDP memiliki konsep untuk pengembangan *creative hub* di Likupang.

Pada 2022, terdapat beberapa pusat unggulan kreatif, yakni Gerai BBI di Surabaya, Jawa Timur, Kota Kreatif Kuliner di Bitung, Sulawesi Utara, Pengembangan Mandalika Creative Hub – NTB, dan Virtual Expo

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Virtual Expo Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022 telah diluncurkan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 April 2022 dalam kegiatan Gernas BBI Sumatra Barat, bersama dengan Menkomarves (online), Menparekraf, Kepala OJK, Gubernur Sumatra Barat, para direksi BUMN, serta pendukung Gernas BBI. Virtual Expo Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022 menggunakan konsep *Metaverse* dan *Gamification*, pengunjung dapat membuat avatar dan masuk mengunjungi *booth* pameran layaknya pameran offline.



Gambar 13. Virtual GerNas BBI Expo di Surabaya

SS.4 Tingkat Ketersediaan Permodalan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif

Sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah ketersediaan permodalan, dalam hal ini investasi atau penanaman modal dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu IKU nilai penanaman modal bidang pariwisata dan ekonomi kreatif adalah jumlah penanaman modal di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif baik dari/oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Dalam penghitungan nilai penanaman modal sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menggunakan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dirilis setiap triwulan. Adapun sektor yang menjadi dasar perhitungan adalah mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI).

Dalam data yang dirilis BKPM terdapat 23 sektor. Adapun bidang usaha yang digunakan untuk menghitung nilai penanaman modal dari sektor pariwisata adalah hotel dan restoran. Penanaman modal yang dihitung adalah penanaman modal dalam negeri maupun dari luar negeri.

Berdasarkan data dari BKPM, realisasi penanaman modal dalam negeri pada bidang usaha tersebut hingga Triwulan IV Tahun 2022 adalah

sebesar Rp21,58 triliun. Sementara itu, realisasi penanaman modal asing pada bidang usaha tersebut hingga Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 498 juta USD atau sebesar Rp7,15 triliun.

Untuk menghitung realiasi penanaman modal pada sektor ekonomi kreatif bidang usaha yang digunakan adalah industri tekstil dan industri barang dari kulit dan alas kaki. Adapun realisasi penanaman modal dalam negeri pada kedua bidang usaha tersebut hingga Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar Rp6,09 triliun. Sementara itu, realisasi penanaman modal asing pada kedua bidang usaha tersebut hingga Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 1,29 miliar USD atau sebesar Rp24,59 triliun.

Jika dijumlahkan maka nilai realisasi penanaman modal pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebesar Rp53,32 triliun atau sebesar 177,73% dari target yang ditentukan yaitu Rp 30 triliun.

PMDN			
No	Bidang Usaha	Investasi (Rp Miliar)	Proyek
1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	75.138,4	9.508
2	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	66.167,8	6.400
3	Pertambangan	62.521,6	4.444
4	Industri Makanan	54.937,0	9.328
5	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	38.878,5	6.446
6	Jasa Lainnya	38.096,7	20.876
7	Konstruksi	33.846,5	24.381
8	Listrik, Gas dan Air	32.107,5	2.201
9	Perdagangan dan Reparasi	31.051,3	78.386
10	Industri Kimia Dan Farmasi	28.905,3	3.477
11	Hotel dan Restoran	21.579,1	14.297
12	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	13.950,5	1.913
13	Industri Kertas dan Percetakan	9.508,2	1.530
14	Kehutanan	8.603,1	764
15	Industri Karet dan Plastik	7.369,8	2.131
16	Industri Lainnya	6.721,3	2.509
17	Industri Mineral Non Logam	6.367,9	1.392
18	Industri Tekstil	5.614,7	2.173
19	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	3.693,2	1.499
20	Industri Kayu	3.587,9	1.557
21	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	2.425,2	827
22	Perikanan	1.214,0	1.474
23	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	483,5	362
TOTAL		552.769,0	197.875

PMA			
No	Bidang Usaha	Investasi (US\$ Juta)	Proyek
1	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	10.960,6	1.908
2	Pertambangan	5.145,0	1.033
3	Industri Kimia Dan Farmasi	4.505,5	2.450
4	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	4.125,1	2.115
5	Listrik, Gas dan Air	3.762,7	912
6	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3.014,6	4.268
7	Industri Makanan	2.424,6	3.786
8	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1.789,4	2.086
9	Industri Kertas dan Percetakan	1.630,1	785
10	Jasa Lainnya	1.558,4	10.464
11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1.522,8	1.856
12	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	788,8	1.953
13	Perdagangan dan Reparasi	736,7	14.674
14	Industri Tekstil	658,3	1.659
15	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	630,4	657
16	Industri Mineral Non Logam	537,3	450
17	Hotel dan Restoran	498,0	7.147
18	Industri Lainnya	415,0	1.623
19	Industri Karet dan Plastik	362,7	1.427
20	Industri Kayu	243,2	669
21	Konstruksi	165,3	660
22	Kehutanan	98,8	121
23	Perikanan	31,6	377
TOTAL		45.605,0	63.080

Gambar 14. Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor Usaha hingga Triwulan IV Tahun 2022

Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

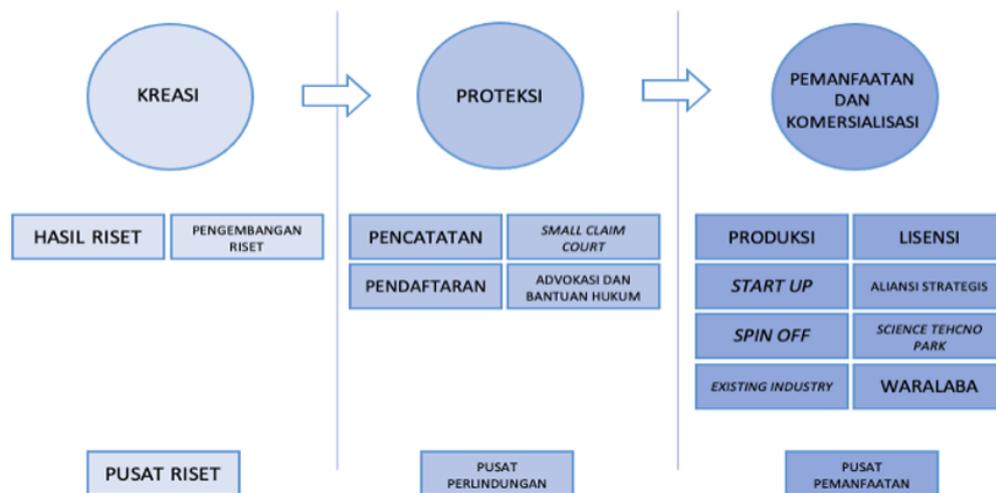
SS.5 Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indonesia masih bertumpu pada sektor pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat *material* dengan jumlah cadangan yang terbatas, dan *trend* dunia yang berfokus pada pengurangan penggunaan sumber daya alam (*net zero emission*) pada 2030. Selain itu, tercatat pendapatan negara atas sektor sumber daya alam terus mengalami penurunan selama empat tahun terakhir.

Diharapkan KI sebagai sektor yang bertumpu pada sumber daya *immaterial* yang tidak akan pernah habis yaitu SDM, dapat menjadi salah satu sektor penopang penerimaan negara pada 2030. Telah dilaksanakan pemetaan strategi nasional KKI, dimana langkah awal

yang akan dilakukan adalah pembentukan sistem hulu-hilir KI melalui pembagian peran K/L di Indonesia.

Tahun 2022 akan difokuskan pada pelaksanaan program sosialisasi dan pelatihan KI yang bersifat massal dan masif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas KI. Program agar dapat dilaksanakan menjadi tiga tahap antara lain (i). penguatan pemerintah pusat, dimana melibatkan seluruh kementerian dan Lembaga, (ii) penguatan pemerintah daerah dan perguruan tinggi, (iii) penguatan masyarakat.



Gambar 15. Konsep Cetak Biru Edukasi, Penciptaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan KI dalam RAN KKI

Selain program Rencana Aksi Nasional Komersialisasi Kekayaan Intelektual (RAN KKI), Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melakukan penyusunan kebijakan dalam bidang kekayaan intelektual, yaitu:

1. Kebijakan pemberdayaan informasi kekayaan intelektual;
2. Kebijakan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual; dan
3. Kebijakan pengelolaan pengembangan kekayaan intelektual.

Kebijakan pemberdayaan informasi kekayaan intelektual dilaksanakan dengan menyusun peta potensi kekayaan intelektual, terutama kekayaan intelektual di 5 DPSP. Diharapkan kebijakan ini, dapat dijadikan dasar dalam pijakan pemanfaatan nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam kekayaan intelektual komunal, sehingga dapat diukur secara nominal terstandar dari nilai-nilai pemanfaatannya.

Selain itu, kebijakan ini juga dilaksanakan dengan integrasi data kekayaan intelektual. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan

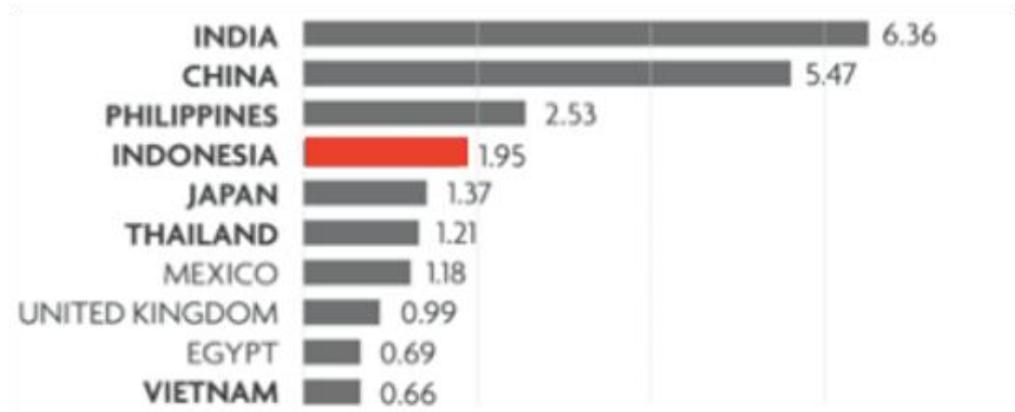
Memorandum of Understanding (MoU) diantara KemenkumHAM dan Kemenparekraf untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan pembiayaan pada lembaga keuangan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Kebijakan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dilaksanakan melalui roving seminar kekayaan intelektual. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat atau UMKM agar dapat mendaftarkan kekayaan intelektualnya sehingga dapat terlindungi secara hukum. Saat ini baru sekitar 11 persen dari 64 juta pelaku UMKM yang telah terdaftar atau terlindungi kekayaan intelektualnya. Pendaftaran kekayaan intelektual sendiri terdiri dari hak cipta, merek, paten, desain industri, indikasi geografis, serta kekayaan intelektual komunal. Saat ini baru sekitar 11 persen dari 64 juta pelaku UMKM yang telah terdaftar atau terlindungi kekayaan intelektualnya.

Kebijakan pengelolaan pengembangan kekayaan intelektual dilaksanakan dengan mempersiapkan tindak lanjut yang dibutuhkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Telah dilaksanakan beberapa rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga dan Kemenparekraf telah membentuk Kelompok Kerja internal untuk menyelesaikan setiap isu.

SS.6 Jumlah Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan jumlah sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam upaya pengelolaan dan pengembangan tata Kelola SDM pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, terutama di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Pada 2014 - 2019, sektor pariwisata di kawasan Asia-Pasifik menyumbang 21,5 juta atau 56% lapangan kerja baru secara global. Selain itu, tujuh negara di Kawasan Asia-Pasifik masuk sebagai negara dengan penyumbang lapangan pekerjaan tertinggi di sektor pariwisata.



Gambar 16. Negara Penyumbang Lapangan Pekerjaan Sektor Pariwisata Tertinggi Tahun 2014-2019 (Dalam Juta)
Sumber: *World Travel & Tourism Council, 2021*

Sehubungan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang melaksanakan koordinasi sertifikasi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional. Adapun kebijakan tata kelola sumber daya manusia yang telah dilakukan sepanjang 2022 adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan mengkoordinasi kebijakan program pemagangan Kemenparekraf bagi siswa SMK dan mahasiswa pariwisata di wilayah KJRI Johor Baru, Malaysia;
2. Mengintegrasikan program Kedaireka oleh Kemendikbudristek dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini merupakan program bantuan bagi insan perguruan tinggi yang sepakat berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Kedaireka. Bantuan hibah yang diberikan pada program ini sebesar Rp 1 triliun;
3. Koordinasi implementasi ASEAN Toolbox dan integrasi kurikulum pelatihan. Penerapan instrumen toolbox ASEAN pada pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja telah ditetapkan BNSP melalui SE.004.BNSP.II.2022. Selain itu, Kemenkomarves berkoordinasi dengan Kemenaker untuk percepatan penerapan kurikulum ASEAN Toolbox di BBPVP Medan dan BPVP Lombok Timur.
4. Koordinasi konvensi nasional RSKKNI, KKNi dan skema okupasi bidang pemandu keselamatan wisata tirta; dan
5. Koordinasi penyusunan draf Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata. Tujuan dari penyusunan PP ini adalah (i) meningkatkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki para tenaga kerja dan memastikan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja sehingga mampu meningkatkan daya saing, dan (ii) perbaikan dari PP nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha

di Bidang Pariwisata

3.1.3 Internal Business Perspective

SS.7 Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan jumlah rencana rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti untuk diterbitkan. Adapun beberapa kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Usulan Anggaran Pembangunan Pariwisata di Lima DPSP T.A. 2023-2024

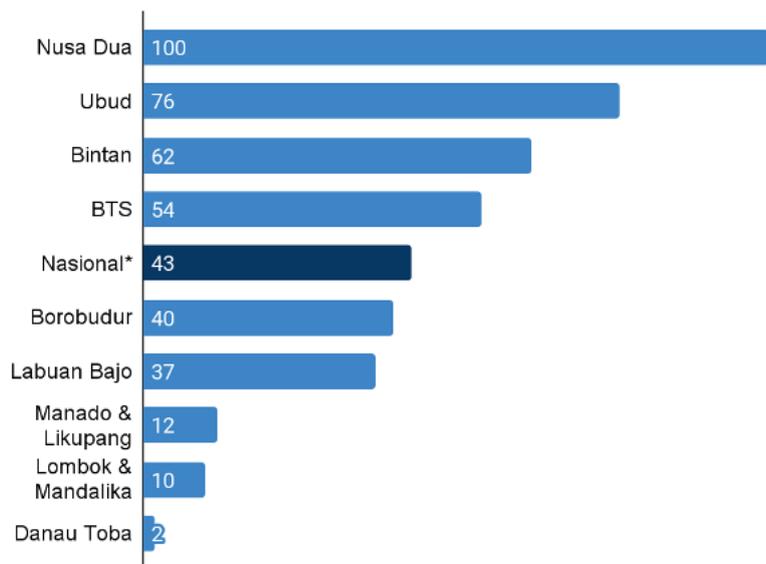
Permasalahan utama adalah (i) masih belum optimalnya pengembangan pariwisata berkualitas untuk mencapai target pariwisata, dan (ii) penilaian Indeks Quality Tourism 5 DPSP di bawah rerata nasional.

Indikator	Baseline	Capaian	Target
	2019	2021	2024
Devisa (USD, Miliar)	18,4	0,4	21,5 - 22,9
Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,8	4,2	4,5
Kontribusi Tenaga Kerja (Juta Orang)	14,9	14,3	15
Jumlah Wisman (Juta Kunjungan)	16,1	1,6	16 - 17
Jumlah Wisnus (Juta Kunjungan)	282,9	180 - 220*	320 - 335
Peringkat TTCI/TTDI	40	32	29 - 34

Tabel 4. Capaian dan Target Indikator Pariwisata

Sumber: BPS, BI, Perpres 85 Tahun 2021 Tentang RKP 2022

(*) Perkiraan Pada RKP 2022



Gambar 17. Penilaian Indeks Quality Tourism Destinasi Pariwisata Indonesia (Skala 1-100)

Sumber: Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata

Arahan Rakornas Pengembangan Lima DPSP Semester I-2022, usulan anggaran tambahan untuk penyelesaian pembangunan 5 DPSP adalah sebesar Rp 19.3 triliun hingga 2024. Usulan anggaran tambahan telah memperoleh dukungan dari Presiden RI pada kunjungan kerja ke Danau Toba pada 2 Februari 2022. Hal ini bertujuan untuk (i) menyinkronisasi anggaran, (ii) memprioritaskan anggaran, dan (iii) memastikan kebutuhan anggaran penyelesaian 5 DPSP teralokasi.

Pada Juli - Agustus 2022, telah dilaksanakan rapat penelaahan bersama dengan pemda dan K/L terkait untuk sinkronisasi, prioritas rincian anggaran dan memastikan ketersediaan anggaran pada K/L/D pengampu. Usulan anggaran tambahan dikategorikan menjadi empat kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan penataan kawasan, perekonomian lokal/masyarakat, dan peningkatan investasi. Setiap usulan tersebut diidentifikasi dan dipastikan apakah kegiatan/proyek tersebut sudah tertampung dalam APBN (RKP, RKA-K/L Pagu Anggaran, dan DAK) ataupun APBD untuk TA 2023 dan 2024. Adapun penelaahan dan diskusi dilaksanakan secara paralel dan dibagi tiap ruang sesuai dengan kategorinya.

Pada penelaahan tersebut dilakukan pengelompokan usulan anggaran tersebut pada tiga kategori yaitu (1) kategori usulan sudah

tertampung dalam APBN* atau APBD untuk TA 2023 yakni sebesar Rp 981,4 miliar, (2) kategori usulan dapat ditampung pada APBN atau APBD 2024 sebesar Rp 3,9 triliun, dan (3) kategori usulan yang akan menjadi tambahan APBN atau APBD TA 2023 sebesar Rp12,9 triliun.

Pada pembahasan usulan anggaran terkait infrastruktur dan penataan kawasan, sebagian besar usulan tidak bisa dibiayai oleh Indonesia Tourism Development Project (ITDP) karena tidak memenuhi kriteria ITMP. Pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi alternatif pembiayaan. Apabila pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan pada tahun 2023, pemda harus memastikan bahwa status lahan sudah clean and clear dan dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap pada akhir tahun 2022.

Pada pembahasan usulan anggaran terkait kelembagaan dan investasi, terdapat usulan kegiatan prioritas yang bisa dilakukan refocussing dan alokasi oleh K/L/D ke APBN/APBD 2023. Hal ini akan ditindaklanjuti ketika penetapan anggaran 2023 sudah dilaksanakan.

Pada pembahasan usulan anggaran terkait perekonomian lokal/masyarakat, ditekankan pentingnya kontribusi APBD untuk memastikan terjadinya kolaborasi antara pemda dan pemerintah pusat. Dalam mengajukan usulan kegiatan dan anggaran kepada K/L, pemda perlu menyampaikan proposal kebutuhan program/kegiatan sedetail dan seakurat mungkin.

Anggaran belanja pemerintah daerah di 5 DPSP mayoritas masih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, dukungan anggaran pemerintah tingkat kabupaten yang ada di 5 DPSP terhadap sektor pariwisata relatif masih kecil. Badan Pelaksana Otorita Pariwisata selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah perlu meningkatkan perannya dalam berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pengembangan 5 DPSP.

Berdasarkan penelaahan tersebut, total usulan anggaran tambahan 2023 menjadi sebesar Rp 16,8 triliun (Tabel 2). Alokasi anggaran terbesar untuk pengembangan infrastruktur dan penataan kawasan (95,3%), diikuti dengan perekonomian lokal (1,9%), dan kelembagaan (1,5%) serta investasi (1,3%). Selain itu, juga telah dilakukan pengumpulan dokumen pendukung untuk 289 kegiatan, dari total 472 kegiatan.

DPSP	Usulan Anggaran Tambahan (Miliar)	
	Sebelum Penelaahan	Setelah Penelaahan
Danau Toba	6,514	5,873
Borobudur	7,134	5,018
Mandalika	2,221	1,566
Labuan Bajo	2,853	3,863
Likupang	606	486
Total	19,328	16,806

Gambar 18. Hasil Telaah Usulan Anggaran
Sumber: Kementerian/Lembaga dan Pemda

Komponen	Total
Infrastruktur dan Penataan Kawasan	16,020
Kelembagaan	252
Perekonomian Lokal/Masyarakat	315
Peningkatan Investasi	221

Gambar 19. Hasil Telaah Usulan Anggaran Berdasarkan Jenis
Komponen Kegiatan
Sumber: Kementerian/Lembaga dan Pemda

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari hasil koordinasi usulan anggaran pembangunan pariwisata di 5 DPSP T.A. 2023-2024 adalah sebagai berikut:

- Mempertimbangkan tren pemulihan pariwisata ke depan, anggaran pemerintah daerah pada 2023- 2024 agar fokus pada: (1) pemeliharaan dan pengelolaan aset KSPN yang telah terbangun, (2) penanganan sampah, dan (3) pelaksanaan event atau kegiatan untuk mendorong traffic (utamanya perjalanan domestik) dan perputaran ekonomi;
- Usulan anggaran tambahan pengembangan 5 DPSP oleh pemda perlu diarahkan untuk memanfaatkan alokasi DAK, khususnya fokus untuk mengembangkan daya tarik wisata (DTW) terintegrasi. Pemda agar mengajukan usulan DAK dan memenuhi seluruh dokumen persyaratan;

- Pemerintah Daerah agar dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai: (1) status lahan seperti kepemilikan, peta lokasi, dan luas); dan (2) dokumen kelengkapan seperti izin lingkungan, readiness criteria, feasibility study, dan DED paling lambat Rabu, 31 Agustus 2022; dan
- Kemenkeu, Bappenas, dan Kemendagri agar menindaklanjuti hasil penelaahan dan sinkronisasi untuk membahas pengajuan usulan anggaran tambahan 5 DPSP beserta dasar hukum yang diperlukan.

2. Koordinasi Penyelenggaraan F1 H2O di DPSP Danau Toba

Atraksi di DPSP Danau Toba masih berupa atraksi alam, event berskala nasional, serta atraksi budaya yang masih berdampak terbatas terhadap peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. Untuk itu, perlu International Event tematik dengan skala besar yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam kunjungan Presiden pada Februari 2022 lalu, Menko Marves telah mengajukan permintaan untuk penyelenggaraan event internasional di DPSP Danau Toba, salah satunya adalah F1 H2O. UIM F1H2O World Championship merupakan balapan powerboat dengan level tertinggi di dunia (seperti MotoGP). Peserta balap terdiri dari 32 negara, jalannya balap juga akan ditayangkan secara live di Asia, Eropa, dan USA.

Adapun lokasi potensial sebagai venue penyelenggaraan adalah kawasan Pelabuhan Balige, Kabupaten Toba. Pelabuhan Balige (Pelabuhan Muliaraja Napitupulu Balige) berlokasi di Kabupaten Toba. Kawasan pelabuhan dikelola oleh Kemenhub melalui BPTD Sumut. Pelabuhan Balige dianggap potensial sebagai tempat pelaksanaan event. Hal ini dikarenakan terdapat Lapangan Sisingamangaraja yang bisa diperuntukan untuk dry paddock. Di samping itu, terdapat kantor pelabuhan yang dapat digunakan sebagai kantor panitia dari UIM. Namun demikian, diperlukan pembangunan area waterfront seluas 200 x 15 meter yang sejajar lapangan. Area waterfront akan digunakan sebagai Wet Paddock F1 H2O. Oleh karena itu, terkait kesiapan venue diperlukan:

1. Percepatan proses pembebasan lahan oleh Pemkab Toba; dan
2. Koordinasi terkait kebutuhan anggaran penataan kawasan Pelabuhan Balige dengan KemenPUPR dan Kemenhub.



Gambar 20. Rencana Awal Penataan Kawasan Penyelenggaraan F1H2O

Sumber: BPIW Sumatera Utara, PUPR

Adapun perkembangan koordinasi penyelenggaraan F1H2O di DPSP Danau Toba adalah sebagai berikut:

1. Pemkab Toba terus melaksanakan pendekatan kepada masyarakat sempadan danau;
2. Pelabuhan Balige agar bersedia untuk direlokasi. Saat ini, 96% masyarakat bersedia untuk direlokasi;
3. Penghapusan aset Kantor Dinas Sosial Kab. Toba dan Kantor Dinas LHK Provinsi Sumut telah selesai dilaksanakan dan akan segera dilakukan pembongkaran; dan
4. Pemkab Toba telah melakukan penyisiran anggaran pada P-APBD 2022 dengan nilai sekitar Rp 10 miliar. Anggaran akan dialokasikan untuk biaya appraisal tanah, biaya kerohiman, bangunan untuk relokasi, perbaikan fasad bangunan Kawasan Pelabuhan Balige, dan peningkatan jalan akses menuju kawasan acara.

Adapun kesimpulan dan tindaklanjut dari hasil koordinasi penyelenggaraan F1H2O di DPSP Danau Toba adalah sebagai berikut:

1. PUPR segera melakukan penataan Kawasan Pelabuhan Balige dan Lapangan Sisingamangaraja; dan
2. Bapak Menko Marves agar dapat memberikan sambutan dalam press conference bersama dengan BUMN InJourney dan FIA pada akhir September 2022.

3. Koordinasi Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Permasalahan Utama adalah pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum memperhatikan konsep pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

Lima agenda pengembangan ekonomi biru, hijau, dan sirkular antara lain (i) penyediaan kendaraan listrik, (ii) pengelolaan sampah berkelanjutan, (iii) penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, (iv) penggunaan energi baru terbarukan, dan (v) peningkatan investasi ecotourism.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup pada sektor pariwisata berupa retribusi, carbon tax, atau Payment for Environmental Services (PES) pada jasa usaha pariwisata/pendukung yang menerima manfaat dari lingkungan hidup, salah satunya ekosistem terumbu karang.

Tujuan utama adalah menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup pada sektor pariwisata melalui program Payment for Environmental Services (PES) secara sukarela di Nusa Dua pada 2022, sebagai langkah uji coba.

Pada 2020, program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) dilakukan di 5 lokasi di Pulau Bali. Total area restorasi terumbu karang seluas 74,3 Ha dan menelan total biaya sebesar Rp 111 M. Permasalahan dalam program ICRG adalah belum adanya program atau kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan utamanya pada upaya pendanaan mandiri. Hasil studi LIPI pada 2021, dibutuhkan dana sebesar Rp 7,8 M per tahun untuk perawatan terumbu karang ICRG di Nusa Dua. Kebijakan Payment for Environmental Services (PES) dapat menjadi alternatif untuk penerapan biaya jasa lingkungan hidup di kawasan Nusa Dua.

Selain itu, Indonesia menjadi Presidensi G20 2022, dimana acara KTT G20 akan dilaksanakan di Nusa Dua pada November 2022. Event tersebut diharapkan dapat dijadikan momentum untuk penerapan PES pada sektor akomodasi di Nusa Dua.

Telah dilaksanakan rapat koordinasi penerapan PES (Dana Karang Indonesia) sebagai instrumen lingkungan hidup sektor pariwisata di Nusa Dua. Rapat turut dihadiri oleh perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko

Marves, Kemenko Ekon, Kemenkeu, KKP, Kemenparekraf, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkominfo, BRIN, BPD LH Pemprov Badung, Pemkab Badung, PT Aviata, PT ITDC, dan UNDP.

Rapat koordinasi bertujuan untuk membahas persiapan kick-off uji coba dan sosialisasi programi Dana Karang Indonesia sebagai sumber pendanaan mandiri untuk pengelolaan dan pelestarian terumbu karang pada program Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) di Nusa Dua.

Adapun kesimpulan dan tindaklanjut dari hasil koordinasi penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemenko Marves, Kemenko Ekon, KLHK, dan Kemenkeu agar dapat melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, KKP, BRIN, BPD LH, dan UNDP agar dapat menyusun peran tugas dan fungsi dari masing- masing K/L/D yang ikut serta dalam pengelolaan program Dana Karang Indonesia;
 3. UNDP dan BRIN agar dapat berkoordinasi untuk memperkaya konten di dalam video sosialisasi dan promosi program Dana Karang Indonesia;
 4. UNDP agar dapat berkoordinasi dengan BPD LH untuk menyusun skema sumber pendanaan biaya pembelanjaan operasinal (*operational expenditure*);
 5. Kemenparekraf agar dapat berkoordinasi dengan Kominfo, UNDP, dan BPD LH untuk membahas (i) *platform/aplikasi* untuk Dana Karang Indonesia, (ii) penyiapan panel Dana Karang Indonesia pada website laman resmi G20, (iii) komunikasi publik penerapan Dana Karang Indonesia; dan
 6. Kemenparekraf, KemenBUMN, PT Aviata, PT ITDC dan UNDP agar dapat menyusun konsep sosialisasi uji coba Dana Karang Indonesia. Sosialisasi agar dapat mulai dilaksanakan pada minggu ke-2 September 2022.
4. Koordinasi Aksi Afirmasi Pembelian dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia

Permasalahan utama adalah belum optimalnya belanja Pemerintah Pusat dan Daerah untuk produk dalam negeri. Pada 2021,

perekonomian Indonesia tumbuh 3,69% meningkat dari 2020. Namun, dikarenakan Impor masih cukup tinggi menyebabkan pengurangan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama adalah menerapkan prinsip dan mekanisme aksi afirmasi untuk membeli produk dalam negeri minimal sebesar 400 triliun pada 2022. Konversi belanja impor ke produk dalam negeri dari belanja pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian lebih dari 5 %.

Untuk 2022, potensi pembelian produk dalam negeri sebesar Rp 1.055,3 Triliun dengan alokasi anggaran Pemerintah Pusat sebesar Rp 519,9 Triliun yang terkonsentrasi 77,0% di 10 K/L. Adapun alokasi anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp 535,4 Triliun. Tujuan utama adalah menerapkan prinsip dan mekanisme terintegrasi aksi afirmasi untuk membeli produk dalam negeri minimal sebesar Rp 400 Triliun dengan komposisi Rp 200 Triliun Pemerintah Pusat dan Rp 200 Triliun Pemerintah Daerah. Hal ini akan berdampak pada penambahan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,6% -1,8% sebagaimana estimasi BPS, dengan penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 1,96 juta orang.

Saat ini, telah terdapat komitmen belanja produk dalam negeri oleh K/L dan Pemda sebesar Rp 607,97 triliun, namun baru terealisasi sebesar Rp 234,56 triliun (38,6%). Sementara itu, komitmen belanja produk dalam negeri oleh 84 perusahaan (BUMN + anak perusahaan) sebesar Rp 296,20 triliun, namun baru terealisasi sebesar Rp 206,00 triliun (69,5%)

5. Koordinasi Percepatan Pendirian Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)

Permasalahan utama adalah belum optimalnya penyediaan akses permodalan bagi UMKM/Koperasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama di wilayah 5 DPSP. Saat ini, Jamkrida telah didirikan di daerah 3 DPSP, yaitu Jawa Tengah, NTB, dan NTT.

Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) merupakan unit BUMD yang dapat memberikan layanan penjaminan kredit bagi UMKM di daerah. Hal tersebut sejalan dengan Arahan Presiden RI pada 20 Januari 2022, agar tidak ada lagi UMKM/korporasi kesulitan mengakses permodalan. Ditargetkan sebanyak 30% dari total kredit diperuntukan bagi UMKM pada 2024, dimana saat ini berkisar antara 18%-20%.

Tujuan Utama adalah mengoptimalkan peran Jamkrida untuk mendukung pengembangan UMKM sektor pariwisata dan ekonomi

kreatif di 3 DPSP dan mempercepat pendirian Jamkrida di wilayah destinasi lainnya, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku pada November 2022.

Sesuai dengan amanat Presiden, 30% dari total kredit nasional agar dapat diperuntukkan bagi UMKM pada 2024, maka perlu perluasan cakupan akses permodalan bagi UMKM/koperasi. Salah satu caranya adalah melalui pengembangan lembaga penjamin kredit (Jamkrida).

Hingga saat ini, telah berdiri 22 perusahaan penjaminan kredit, termasuk Jamkrida pada 18 provinsi. Namun, belum ada Jamkrida baru yang berdiri lagi sejak tahun 2016. Kendala utama adalah kurang intensifnya bimbingan kementerian terhadap pemerintah daerah dan kurang perhatiannya pemerintah daerah dan DPRD dalam menyediakan permodalan.

Sesuai dengan amanat Rakornas Pengembangan 5 DPSP pada 15 Juli 2022, saat ini sedang dilakukan fasilitasi percepatan pendirian Jamkrida di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Maluku dengan target peresmian pada November 2022. Progres perkembangannya adalah sebagai berikut:

- i. Pemprov Sumut telah mengajukan fasilitasi Ranperda ke Kemendagri melalui e-Perda untuk penyelesaian Perda Jamkrida pada 19 Agustus 2022. Fasilitasi selesai maksimal 15 hari setelah pengajuan dan proses berikutnya adalah penerbitan Perda agar pengajuan alokasi anggaran dapat dibahas dalam APBD Perubahan. Anggaran untuk modal yang diajukan adalah sebesar Rp 50 miliar pada 2022 dan Rp 150 miliar pada 2023 dan 2024;
- ii. Pemprov Maluku sedang melaksanakan pembahasan akhir Ranperda di tingkat DPRD dan ditargetkan pertengahan September sudah bisa diajukan ke Kemendagri. Anggaran untuk modal yang diajukan adalah Rp 25 miliar; dan
- iii. Pemprov Sulawesi Utara sedang dalam proses permohonan harmonisasi Ranperda kepada Kanwilcumham. Anggaran untuk modal yang diajukan adalah Rp 25 miliar pada 2020 yang akan ditambah menjadi Rp 100 miliar pada 2023.

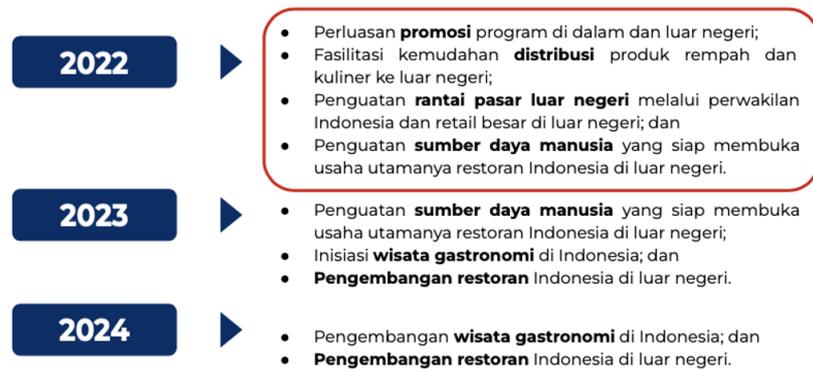
Adapun tindak lanjut pengembangan Jamkrida yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. OJK mengadakan bimbingan teknis fasilitasi proses pendirian Jamkrida, dengan mengundang Pemprov Sumut, Sulut, Maluku

- dan Papua Barat pada 8 September 2022;
2. KemenBUMN melalui BUMN agar dapat ikut serta dalam penyertaan modal dan kerjasama pengembangan Jamkrida;
 3. Kemenparekraf agar dapat berkoordinasi dengan Kemenkop UKM dalam sosialisasi pembinaan akses kredit dan sosialisasi peran/manfaat Jamkrida dalam penjaminan pembiayaan;
 4. Pemprov Sumatera Utara agar dapat berkoordinasi dengan Pemkab/Pemkot dan badan usaha di daerahnya untuk turut serta dalam penyertaan modal pembentukan Jamkrida; dan
 5. Asippindo bersama BPD atau bank lainnya agar menggunakan layanan Jamkrida sebagai penjaminan kredit UMKM.
6. Koordinasi Program Indonesia Spice Up The World (ISUTW)

Permasalahan utama adalah kuliner dan bumbu Indonesia kurang dikenal padahal memiliki cita rasa yang khas dengan potensi rempah yang tinggi. Indonesia Spice Up The World (ISUTW) yang diluncurkan pada 4 November 2021 merupakan program kolaborasi lintas K/L dan swasta yang diharapkan dapat mendorong kuliner Indonesia hadir di mancanegara dan memberi nilai tambah ekonomis.

Target dari Indonesia Spice Up the World hingga 2024 adalah (1) hadirnya 4.000 restoran Indonesia di luar negeri dan (2) peningkatan nilai ekspor bumbu dan rempah menjadi 2 miliar dolar AS. Bumbu yang akan diutamakan adalah bumbu rendang, nasi goreng, sate, soto, gado-gado serta bumbu pendukung seperti kecap manis dengan rempah prioritas ekspor adalah lada, pala, cengkeh, jahe, kayu manis, dan vanilla. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor pangan olahan, terutama bumbu, melalui pemanfaatan rantai produksi global serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi wisata gastronomi.



Gambar 21. Rencana Aksi Pengembangan Program ISUTW

Pada 17 Agustus 2022 telah dilaksanakan Pre-Event ISUTW di terminal keberangkatan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali untuk dengan memberi kesan akhir (last mile experience) menikmati menu Indonesia. Pada 19 - 21 Oktober, akan dilaksanakan Indonesia Week ISUTW di Atlanta. Kegiatan akan mengundang pengusaha restoran, importir di dari pantai Timur dan Barat. Dalam rangka memberikan alternatif pembiayaan kepada pengusaha resto, sedang dikembangkan jalur pembiayaan khusus untuk membuka restoran Indonesia di luar negeri melalui Penugasan Khusus Ekspor sebesar 500 miliar Rupiah.

7. Koordinasi Percepatan Pengembangan 5 DPSP

Pemerintah ingin mewujudkan 10 Bali Baru melalui program pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). 10 DPP tersebut merupakan Major Project sebagai salah satu agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024. Selanjutnya, dalam mengedepankan fokus pembangunan pariwisata di lima tahun berjalan, ditetapkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Lima DPSP tersebut merupakan Arah Presiden pada Rapat Terbatas 15 Juli 2019.

Permasalahan utama adalah belum optimalnya pengembangan lima DPSP sehingga perlu dilakukan langkah-langkah percepatan penanganan isu-isu pengembangan lima DPSP dimaksud. Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara intens berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Setiap bulannya, Kemenko Marves juga secara rutin menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mengakomodir pending issues dan memantau progres isu yang harus diselesaikan

guna mencapai target pengembangan pariwisata berkualitas. Kemenko Marves juga secara aktif turun ke lapangan guna monitoring secara langsung, memetakan masalah, dan berkoordinasi dengan pihak terkait demi mencapai solusi bersama terhadap isu-isu yang harus diselesaikan. Secara umum, progres pengembangan 5 DPSP sampai dengan akhir Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan DPSP Borobudur

Pokok-pokok pembahasan terkait isu penerapan kebijakan pengaturan pengunjung (*visitor management plan*) adalah Kemendikbudristek saat ini masih menunggu proses pendetailan SOP. Akan dikeluarkan dua SOP, yaitu (a) SOP terkait pengaturan pengunjung dan (b) SOP terkait pemanfaatan Candi Borobudur, Prambanan, Pawon, dan Mendut untuk kepentingan keagamaan. SOP diharapkan dapat memuat keseimbangan antara nilai-nilai bisnis, budaya, keagamaan, dan adat istiadat Jawa.

Pokok-pokok pembahasan terkait isu sertifikasi dan pelatihan pemandu wisata adalah sebagai berikut:

1. Total jumlah pemandu HPI yang berada di Kabupaten Magelang di Borobudur adalah sebanyak 54 orang dengan proporsi gender laki-laki sebanyak 45 orang dan perempuan sebanyak 9 orang, sedangkan total pemandu wisata yang masih aktif adalah sebanyak 34 orang. Adapun pendetailan data berdasarkan kelompok umur dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok umur, antara lain: (i) umur 30-40 tahun sebanyak 6 orang, (ii) umur 40-50 tahun sebanyak 12 orang; dan (iii) umur 50-60 tahun sebanyak 38 orang.
2. Proporsi pemandu wisata usia muda dan perempuan masih rendah. Untuk itu, perlu disusun program khusus untuk meningkatkan jumlah proporsi pemandu wisata usia muda dan perempuan di Kab. Magelang. Penambahan pemandu wisata dapat dilaksanakan melalui Dinas Pariwisata Kab. Magelang.
3. Kemenaker saat ini memiliki program pemagangan. Namun demikian, fokus pemagangan bidang pariwisata pada tahun 2022 adalah *hospitality*. Selain itu, DPSP Borobudur telah memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang terkait bidang kepariwisataan, di mana pada tahun 2023 dapat diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan pemandu wisata di kawasan

Borobudur. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan pemandu wisata di kawasan Borobudur sehingga dapat dijadikan acuan untuk jumlah alokasi pengadaan atau penyediaan SDM dengan kompetensi pemandu wisata yang dibutuhkan.

4. Perlu disiapkan materi khusus mengenai pemandu wisata berbasis teknologi untuk meningkatkan wisata di kawasan Borobudur. Sebagai contoh, *virtual tours of paris* menetapkan harga mulai dari 180 euro untuk satu orang dalam satu kali trip dengan durasi satu jam. Pembahasan lebih lanjut mengenai pemandu wisata berbasis teknologi agar dilaksanakan bersama AGI, CAKRA, dan GoPlay.

Pokok-pokok pembahasan terkait isu pengelolaan *homestay* adalah sebagai berikut:

1. Kemenparekraf telah selesai menyusun kajian pengelolaan *homestay/sarhunta*. Saat ini, *executive summary* sedang dalam proses penyusunan dan nantinya dapat menjadi pegangan untuk K/L dan pemda. Pengelolaan *homestay* dapat dilaksanakan melalui BUMDes. Untuk itu, diperlukan penyamaan persepsi dengan Kemendes PDTT dan pemda (Pemprov Jateng dan Kab. Magelang).
2. Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran untuk *homestay* di 2023. Anggaran tersebut nantinya dapat dialokasikan untuk pengembangan *homestay* yang telah ditunjuk/ ditentukan untuk proyek percontohan. Ke depannya, pengembangan *homestay* akan dilaksanakan bersama dengan Injourney untuk meningkatkan *traffic* dan akan dikaitkan dengan *travel pattern* BTOC yang telah disusun oleh Kemenparekraf.

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari kedua isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ui petik dan pembahasan dengan komunitas Buddha dan budaya agar dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum SOP pengaturan pengunjung dan pemanfaatan Candi Borobudur, Prambanan, Pawon, dan Mendut untuk keagamaan ditetapkan.
2. Kemenparekraf melalui Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan bersama Kemendikbudristek, Kemenaker, dan BAKTI agar menyusun (i) jumlah optimal untuk pemandu wisata di Kawasan Borobudur, (ii) *Training Need Analysis*

(TNA) untuk pemandu wisata, dan (iii) silabus pemandu wisata di kawasan Borobudur, dalam membuat materi pelatihan agar dilaksanakan bersama BAKTI untuk pemandu wisata berbasis teknologi.

3. Kemenparekraf melalui Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan bersama Kemendikbudristek, Kemenaker, dan BAKTI agar melaksanakan *road to campus* guna menelusuri ketertarikan mahasiswa untuk menjadi pemandu wisata (kampus dan/atau politeknik).
4. Kemenparekraf agar dapat berkoordinasi dengan Kemendes PDTT dan Pemkab Magelang dalam pembentukan lembaga pengelola *homestay* melalui BUMDes di kawasan Borobudur.
5. *Pilot project homestay* akan dilaksanakan di tiga desa. Penunjukan tiga desa sebagai *pilot project homestay* agar dapat segera dilakukan, dan evaluasi akan dilaksanakan tiga bulan setelah pelaksanaan penandatanganan MoU/PKS. Penandatanganan MoU/PKS agar dapat dilaksanakan pada minggu ke-1 oktober 2022.
6. Pembahasan mengenai *homestay/sarhunta* akan dibahas kembali menjadi tiga isu utama pada perkembangan isu dan tindak lanjut DPSP Borobudur September 2022.

b. Pengembangan DPSP Labuan Bajo

Perkembangan terkait penyelesaian pembangunan ruas jalan Labuan Bajo – Tana Mori adalah sebagai berikut:

1. Progres pembangunan fisik jalan dan jembatan ruas Labuan Bajo – Tana Mori sepanjang 25 km telah mencapai 55,59%. Pembangunan ruas jalan masih terkendala pada STA 0 – 450 meter, yang mengakibatkan keterlambatan progres hingga - 4,38% dari target. Selain kendala lahan, terdapat utilitas yang perlu dipindahkan. Pembangunan jalan ruas Labuan Bajo – Tana Mori dengan ROW 23 meter ditargetkan selesai pada akhir 2022.
2. Pemkab Manggarai Barat telah berkoordinasi dengan KemenATR/BPN dan Kantor Pertanahan terkait kendala lahan di Labuan Bajo, termasuk lokasi STA 0 – 450 meter. Hasil koordinasi menemukan bahwa tanah di wilayah Gorontalo – Warloka seluas 4.000 Ha merupakan tanah milik pemda berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 180 Tahun 1991 tentang Penguasaan atas Tanah Persekutuan Adat Seluas 4.000 Ha di Dataran Nggorang dan di sekitarnya Kecamatan Komodo, Manggarai

Barat oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai.

Perkembangan terkait pembangunan dalam kawasan lahan otorita BPOLBF adalah sebagai berikut:

1. Progres pembangunan jalan akses lahan otorita sepanjang 1,5 km telah mencapai 61,32% dari rencana 60,22% (Deviasi 1,10%). Lebar pintu akses jalan masuk lahan otorita berdasarkan *Detail Engineering Design* (DED) adalah 24 meter, namun saat ini lebar pintu akses jalan masuk tersebut masih 5 meter. Adapun pembangunan akses jalan masuk ditargetkan selesai pada 15 Oktober 2022.
2. Saat ini, belum terdapat aliran air bersih ke lahan otorita. Berdasarkan informasi dari pengelola SPAM Wae Mese, kapasitas air bersih di Labuan Bajo dapat terpenuhi, termasuk di kawasan otoritatif dan desa penyangga di sekitarnya. Lebih lanjut, BPOLBF perlu berkoordinasi dengan Perusahaan Air Minum (PAM) Manggarai Barat untuk instalasi air bersih ke kawasan otoritatif.
3. Tata batas dilahan APL kawasan otoritatif telah selesai dilakukan. Saat ini sedang dilakukan proses kompilasi data akhir untuk Dokumen Berita Acara Hasil Tata Batas oleh BPKH Kupang.
4. Kemenparekraf dan BPOLBF telah berkoordinasi dengan Pemkab Ngada untuk penyediaan lahan pengganti dari lahan otorita. Saat ini, sedang dalam proses administrasi dan penyusunan dokumen. Adapun dokumen *clean and clear* untuk lahan pengganti di Kabupaten Ngada ditargetkan selesai pada 2 September 2022, yang selanjutnya akan disampaikan ke KLHK.

Perkembangan terkait rencana relokasi pelabuhan Labuan Bajo adalah sebagai berikut:

1. Kemenhub akan memindahkan pelabuhan kapal RORO *Long Distance Ferry* (LDF), pelayaran rakyat (Pelra), dan kapal penyebrangan (ASDP) dari Pelabuhan Labuan Bajo. Saat ini, Kemenhub melalui Ditjen Hubla dan Ditjen Hubdat sedang melakukan kajian untuk pencarian lokasi baru untuk tempat sandar kapal tersebut. Pemindahan kapal-kapal tersebut pada pelabuhan baru ditargetkan selesai pada Semester 1 tahun 2024.

2. Ditjen Hubla Kemenhub tengah menyusun *Feasibility Study* (FS) untuk rencana pemindahan pelabuhan kapal ROROLDF dan pelayaran rakyat, sedangkan Ditjen Hubdat Kemenhub tengah menyusun FS untuk relokasi kapal penyeberangan. Dari hasil temuan awal terdapat dua opsi lokasi yaitu Terminal Multipurpose Wae Kelambu dan Nanga Bido.
3. Berdasarkan hasil awal FS terkait pelabuhan kapal penyeberangan, Terminal Multipurpose Wae Kelambu memiliki skor penilaian tertinggi. Hasil tersebut telah dilaporkan dan disetujui oleh Menteri Perhubungan. Proses selanjutnya adalah penyusunan DED yang akan ditargetkan selesai pada akhir 2022.
4. Terminal Multipurpose Wae Kelambu dipilih karena pertimbangan akses jalan yang telah terbangun, merupakan kawasan pelabuhan eksisting, dan akselerasi penyelesaian pembangunan. Sedangkan untuk lokasi Nanga Bido terdapat kekurangan yaitu belum adanya akses jalan dan lahan yang belum *clean and clear*.

Adapun kesimpulan dan tindaklanjut dari ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemkab Manggarai Barat agar berkoordinasi dengan KemenATR/BPN terkait penyelesaian masalah lahan di Labuan Bajo, termasuk permasalahan lahan pada akses jalan Labuan Bajo – Tana Mori STA 0 - 450 meter.
2. BPOLBF agar berkoordinasi dengan Pemkab Manggarai Barat, KemenPUPR, PDAM, dan PLN terkait (i) pelebaran pintu akses jalan masuk lahan otorita sesuai DED dan ketersediaan lahannya dan (ii) proyeksi dan ketersediaan akses air bersih dan listrik ke lahan otorita serta desa sekitar.
3. Kemenkomarves, Kemenhub, KemenPUPR, dan Pemkab Manggarai Barat agar melakukan peninjauan lapangan ke Nangabido dan Terminal Multipurpose Wae Kelambu untuk mengecek rencana relokasi pelabuhan.

c. Pengembangan DPSP Mandalika

Terkait relokasi warga terdampak di Dusun Ngolang, terdapat perkembangan sebagai berikut:

1. Pembangunan rumah khusus untuk relokasi warga telah selesai 100%. Ada keterlambatan di awal pengerjaan karena harus dilakukan pembuatan dinding penahan dan pemadatan

di lahan yang akan dilakukan pembangunan. Saat ini dalam tahap persiapan pemindahan warga ke rumah relokasi oleh Pemda Lombok Tengah.

2. ITDC telah selesai mengerjakan penyediaan air sementara dan saat ini dalam proses pengerjaan persediaan air permanen yang ditargetkan selesai pada Oktober 2022. Selain itu, pengerasan jalan sepanjang 2,5 km dalam proses survei. Surat pemberitahuan pengerjaan sudah disampaikan ke OPD terkait. Pengerjaan akan dimulai pada pertengahan September 2022 dan ditargetkan selesai pada Desember 2022.
3. KemendesPDTT akan melakukan inisiasi kelembagaan ekonomi desa di kawasan Ngolang untuk meningkatkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya salah satunya melalui dukungan dana desa.

Terkait pengembangan tujuh desa wisata di Kawasan Mandalika, terdapat perkembangan sebagai berikut:

1. Kemenparekraf telah melakukan rapat teknis terkait pengembangan tujuh desa di Kawasan Mandalika. Lebih lanjut, telah dibuat pemetaan kebutuhan K/L untuk pengembangan desa wisata. Kemudian, disepakati bahwa desa-desa tersebut akan dibagi menjadi tiga zona sebagai berikut: 1) zona 1 yaitu Desa Kuta dengan arah pengembangan pariwisata *hospitality, sport tourism, entertainment*, wisata alam, dan ekonomi kreatif; 2) zona 2 yaitu Desa Sengkol (bagian selatan), Prabu, Tumpak, dan Mertak yang menjadi penyangga zona 1 dengan pengembangan pariwisata *sport tourism*; dan 3) zona 3 yaitu Desa Rembitan, Sengkol (bagian utara), dan Sukadana dengan arah pengembangan pariwisata budaya, religi dan ekonomi kreatif.
2. Diperlukan promosi terintegrasi terkait *homestay* dengan *Online Travel Agent* (OTA). Pemprov NTB telah melakukan kerja sama dengan Traveloka dan Reddoorz untuk pemasaran *homestay* dan akan melakukan optimalisasi. KemendesPDTT membantu pengelolaannya dengan petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh Kemenparekraf.
3. KemendesPDTT bersama Kompas tengah mengadakan *travel fair* yang mempertemukan antara perbankan, agen travel, dan maskapai penerbangan dalam satu paket perjalanan, yang di antaranya akan mengunjungi desa wisata

unggulan daerah. Acara akan dilakukan pada 9 – 10 September 2022 dan menargetkan 10.000 pengunjung; dan

Terkait persiapan pelaksanaan WSBK 2022, terdapat perkembangan sebagai berikut:

1. WSBK 2022 akan dilaksanakan pada 11 – 13 November 2022. AP1 Lombok akan melakukan penataan parkir pesawat di Bandara Lombok mengingat ada beberapa bandara yang dijadikan parkir pesawat delegasi G20.
2. KLHK menyarankan pelibatan pihak ketiga dalam penanganan sampah sebelum, selama, dan setelah kegiatan WSBK berlangsung.
3. Beberapa persiapan yang akan dilakukan ITDC dalam rangka pelaksanaan WSBK 2022 yakni (1) penyiapan lokasi parkir di dekat sirkuit, (2) koordinasi pengamanan dan penataan lalu lintas dengan Polri, dan (3) pembuatan daftar kebutuhan kepabeanan.

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari ketiga isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. KemendesPDTT, Kemenparekraf, Pemda Lombok Tengah dan ITDC untuk melakukan pengembangan kelembagaan dusun Ngolang.
2. KemenPUPR dan Pemda Lombok Tengah untuk melakukan percepatan serah terima rumah relokasi. Oleh sebab itu, akan dilakukan rapat teknis relokasi warga terdampak ke Dusun Ngolang beserta penghijauan di kawasan dengan target pelaksanaan pada minggu ke-2 September 2022. ITDC untuk memfasilitasi acara relokasi warga terdampak.
3. Kemenparekraf untuk membuat demografi tujuh desa wisata dan pendetailan kebutuhan dari K/L. Demografi dan detail kebutuhan kolaborasi K/L untuk dapat dipresentasikan pada minggu ke-4 September.
4. KemendesPDTT dan Kemenparekraf untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan *travel fair* tahunan yang mempromosikan desa wisata.
5. Akan dilakukan rapat tingkat Es.1 dalam rangka persiapan WSBK 2022 pada 12 September 2022. ITDC untuk dapat mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: (i) rencana mandiri yang akan dilakukan ITDC di dalam dan luar kawasan ITDC salah satunya terkait dokumen kepabeanan, (ii) rencana kolaborasi antara ITDC dengan Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah, dan (iii) rencana kolaborasi antara ITDC dengan pemerintah pusat.

6. Akan dilakukan pertemuan tindak lanjut secara luring antara Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah, ITDC, dan MGPA untuk persiapan WSBK.

d. Pengembangan DPSP Likupang

Pada 24-26 Agustus 2022, telah dilaksanakan Kunjungan Lapangan dan Koordinasi Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang di Pulau Bangka. Kunjungan dan koordinasi dilakukan ke beberapa kantor lembaga dan pemda terkait, yaitu (a) Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Utara, (b) Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, dan (c) Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu, kunjungan lapangan juga dilakukan ke Desa Lihunu dan Desa Kahuku di Pulau Bangka.

Kegiatan kunjungan lapangan bertujuan untuk meninjau progres pengembangan DPSP Likupang, di antaranya (a) perkembangan persiapan kegiatan kompetisi Likupang North Sulawesi International Fishing Competition 2022 dan (b) kunjungan lapangan dengan Tim KemenPUPR untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Bangka.

Adapun pokok-pokok pembahasan dan temuan dalam kunjungan lapangan adalah sebagai berikut:

1. Acara Likupang North Sulawesi International Fishing Competition (LNSIFC) 2022 akan diselenggarakan pada 14-18 September 2022. Panitia menargetkan partisipasi peserta sebanyak 500 orang untuk kategori peserta internasional dan 200 orang untuk kategori peserta tradisional. Selanjutnya, panitia telah menyampaikan surat undangan kompetisi kepada Kemenlu untuk dikirimkan ke KBRI di berbagai negara. Berkaitan dengan hal tersebut, panitia telah menerima respon umpan balik terkait teknis kompetisi dari beberapa negara.
2. Hingga 18 Agustus 2022, sebanyak 78 grup peserta dengan masing-masing anggota berjumlah 5-7 orang dari dalam dan luar negeri telah melakukan registrasi untuk kategori Internasional. Adapun beberapa WNA yang teregistrasi di antaranya berasal dari Malaysia, Australia, Kazakhstan, Amerika, dan Perancis. Sementara itu, panitia masih melakukan sosialisasi kompetisi kepada para nelayan kecil di

15 kabupaten dan kota sekitar Sulawesi Utara, karena belum ada peserta teregistrasi untuk kategori tradisional.

3. Pemerintah daerah terkait telah menyetujui titik lokasi di tiga tempat yang menjadi jalur yang akan dialui oleh peserta, yaitu Kabupaten Minahasa Utara, Kepulauan Biaro (Kabupaten Sitaro), dan Kawasan Megamas (Kota Manado). Kompetisi akan dibuka oleh Menteri KKP, bersamaan dengan peresmian aplikasi e-mancing dan rapat teknis di Hotel Paradise pada tanggal 14 September 2022, sedangkan penutupan akan dilakukan di Kawasan Megamas pada 18 September 2022. Dalam hal ini, Menko Marves diharapkan dapat turut menghadiri rangkaian acara dimaksud.
4. Selain itu, terdapat *side event* berupa bazaar UMKM, festival makan tuna sashimi, dan pagelaran budaya. Terkait bazaar, UMKM yang akan ikut serta perlu melalui proses kurasi guna menjaga standardisasi kualitas produk. Sementara itu, ditargetkan festival makan tuna sashimi dapat memecahkan rekor MURI sebagai konsumsi sashimi terbanyak se-Indonesia.
5. Saat ini, sedang dilakukan persiapan administrasi persuratan yang ditujukan kepada Setneg terkait permohonan persetujuan Piala Presiden. Permohonan sebelumnya telah dikirimkan melalui KKP dengan Setneg sebagai tembusan namun belum kunjung mendapatkan jawaban memadai, sehingga dilakukan persuratan ulang.
6. Terdapat beberapa hal yang membutuhkan dukungan, yakni (i) subsidi BBM dari PT. Pertamina untuk kapal peserta yang akan digunakan dalam kompetisi, (ii) kapal pengamanan di laut untuk mengawasi dan menjamin keamanan selama kompetisi berlangsung, dan (iii) bantuan peminjaman armada kapal dengan estimasi sejumlah 60 unit kapal sesuai standar teknis 10-25 GT untuk dipinjamkan kepada peserta kompetisi. Hal ini dikarenakan kapal-kapal inventaris yang akan dipinjamkan kepada peserta telah mengalami penurunan kondisi.
7. Panitia menyiapkan penginapan untuk peserta di Hotel Paradise. Sebanyak 150 hingga 200 unit kamar akan dipesan sesuai dengan konfirmasi jumlah peserta sebelum rapat teknis. Dinas Pariwisata Sulawesi Utara menjadi penanggung jawab yang akan memfasilitasi penginapan untuk peserta, bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sulawesi Utara. Saat ini, pihak terkait sedang dalam tahap negosiasi dengan pihak hotel.

8. Untuk memperoleh pengakuan internasional, penitia mengadopsi kriteria penilaian dan mengharapkan peran serta dari International Game Fishing Association (IGFA). Kriteria penilaian mencakup teknik tangkap-lepas, serta bobot dan jenis ikan yang ditangkap. Adapun kehadiran juri dari IGFA belum dapat dikonfirmasi.
9. KemenPUPR tengah menindaklanjuti surat dari Kemenko Marves terkait dukungan percepatan pembangunan DPSP Likupang, khususnya di Pulau Bangka.

Selanjutnya, pada 25 Agustus 202 telah dilakukan survei rencana lokasi-lokasi pembangunan dengan hasil sebagai berikut:

1. Terkait pembangunan jalan nasional: warga telah menyerahkan lahan untuk pembangunan jalan, dari semula berukuran 8 meter melebar menjadi 10 meter. Di sisi lain, perbaikan akses jalan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pelajar di empat desa Pulau Bangka untuk bersekolah ke SMP di Desa Lihunu.
2. Terkait pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM), telah dilakukan peninjauan langsung ke tiga lokasi sumber mata air. Sumber mata air pertama terletak di lapangan sepak bola, Desa Lihunu, yang merupakan hasil bor mandiri oleh masyarakat. Sumber mata air kedua terletak di tengah hutan Pulau Bangka, antara Desa Lihunu dengan Desa Ehe, dengan jarak sekitar 5 km dari Desa Lihunu. Sedangkan sumber mata air ketiga terletak di Desa Kahuku. KemenPUPR akan mengeruk dan membangun *reservoir* di ketiga lokasi sumber mata air.
3. Terkait pembangunan *homestay* dan rumah tidak layak huni (RTLH), Dinas PU telah memberikan daftar usulan penerima bantuan *homestay* dengan sebaran sebanyak 50 warga di Desa Kahuku, 48 warga di Desa Ehe, 34 warga di Desa Libas, dan 29 warga di Desa Lihunu. Saat kunjungan dilakukan, sudah ada sebanyak 76 *homestay* milik warga di Desa Marinsow dan Desa Pulisan yang telah beroperasi dengan biaya sewa rata-rata Rp 300.000 per malam. Telah dilakukan pula pengecekan terhadap 8 *homestay* di Lihunu oleh Tim PUPR.
4. Terkait fasilitas penunjang pariwisata lainnya, KemenPUPR merencanakan untuk menata kawasan Pulau Bangka yang akan dimulai dari Desa Lihunu, sedangkan pembangunan *Mangrove Park* direncanakan akan dilakukan di Desa Libas.

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Panitia LNSIFC 2022 agar segera menyampaikan perkembangan terbaru dari jumlah peserta yang teregistrasi, terutama peserta dari kategori tradisional/lokal guna pendataan alokasi kebutuhan penginapan dan subsidi BBM sebelum rapat teknis.
 2. Panitia LNSFIC 2022 agar segera memetakan kontribusi dari pemerintah provinsi dan instansi lainnya, termasuk kebutuhan dukungan yang diperlukan.
 3. Pemerintah kabupaten Minut agar segera menyelesaikan dan mengirimkan dokumen-dokumen pendukung usulan anggaran pengembangan DPSP Likupang untuk mempercepat pembangunan di Pulau Bangka.
8. Koordinasi Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GerNas BBI) Tahun 2022

Program Bangga Buatan Indonesia merupakan salah satu program pemerintah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui pengembangan UMKM Indonesia. Gernas BBI diluncurkan secara resmi oleh Presiden pada 14 Mei 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun agenda Kampanye GerNas BBI beserta *campaign manager* yang berasal Kementerian atau Lembaga tertentu.

Bulan	Provinsi/Wilayah	Campaign Manager	Co-Campaign	Top Brands 1 Tahun*)
Januari	Banten	Kemenhub	KemenLHK	1. BNI 2. Telkom 3. Mustika Ratu 4. Grab 5. Gojek 6. LinkAja 7. Garuda Ind
Februari	Kalimantan Tengah	Kemenparekraf	KemenkumHAM	
Maret	Sulawesi Tengah	Kemendag	KemenPUPR Kemenaker	
April	Papua Barat	Bank Indonesia	BRIN Bappenas	
Mei	Kalimantan Utara	KKP	Kemenkeu Kemensos	

Juni	Sulawesi Tenggara	Kemenperin	LKPP	8. Citilink 9. Advan 10. Id Cloud Host 11. Shipper 12. Yokke 13. PT Pos Indonesia
Juli	Gorontalo	Kominfo	Kementan	
Agustus	Bengkulu	Kemendikbud Ristek	Keminvess	
September	Riau	Kemendes PDTT	BRIN	
Oktober	Indonesia Bag. Timur	Kemenkop UKM	Kemensos	
November	Indonesia Bag. Barat	OJK	ATR/BPN	
Desember	Indonesia Bag. Tengah	KBUMN	BPS	

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan GerNas BBI 2022

9. Koordinasi Pengelolaan Aset di 5 DPSP

Dalam rangka membentuk destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, pemerintah melalui KemenPUPR telah melakukan kegiatan pembangunan dan penataan fasilitas sarana dan prasarana atau aset penunjang kawasan pariwisata di 5 DPSP dengan total investasi mencapai kurang lebih Rp 800 miliar.

Permasalahan utama adalah belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset KSPN yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR di 5 DPSP. Aset KSPN dengan nilai investasi yang besar perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan, sehingga dapat terhindar dari kerusakan dan vandalisme serta memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan masyarakat.

Pengelolaan aset KSPN perlu mengedepankan aspek pemeliharaan, pengamanan, pengembangan fasilitas, dan pemanfaatan, baik yang memiliki potensi ekonomis. Untuk itu, perlu disusun guidelines untuk mekanisme pengelolaan aset KSPN. Terdapat 2 opsi pengelolaan aset di 5 DPSP, yaitu dikelola langsung oleh penerima aset dan kerjasama penerima aset dengan badan usaha.

Tujuan utama adalah pengelolaan dan pemanfaatan aset KSPN yang telah dibangun dapat dilakukan segera, berjalan optimal dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan dampak ekonomi dan

sosial bagi daerah dan masyarakat sekitar.

Pengelolaan aset KSPN akan dilakukan dengan tiga pedoman umum, antara lain:

1. Aset akan diserahkan kepada pemerintah Daerah selaku pemilik lahan;
2. Pemerintah daerah wajib mengerjakamakan aset melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) dengan BUMN dan/atau Badan Layanan Umum yang memiliki tugas dan fungsi pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
3. Akan dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi lintas sektoral yang akan melaksanakan monev pengelolaan aset pada tiap tahunnya.

Isu	April			Mei			Juni					Juli				
	3	4	5	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
Finalisasi Pemetaan Daftar Aset (selesai) Oleh KemenPUPR																
Hasil Reviu Lintas Sektor untuk Skema Pengelolaan yang akan disampaikan oleh Pemda Hasil reviu akan disampaikan oleh Kemenparekraf																
Draf Dasar Hukum (Kepres) Akan disusun oleh KemenPUPR																
Pengajuan Izin Prakarsa Akan disampaikan oleh Kemenko Marves																
Pelaksanaan Serah Kelola dan Proses Serah Terima Oleh KemenPUPR																

Gambar 22. Linimasa Pengelolaan Aset di 5 DPSP

Telah dilaksanakan kunjungan lapangan ke lima lokasi aset infrastruktur KSPN Candi Borobudur, yaitu (i) Gerbang Klamong, (ii) Gerbang Palbapang, (iii) Gerbang Blondo, (iv) Gerbang Kembanglimus, dan (v) Plaza dan Concourse Candi Borobudur, serta Diskusi Kelompok Terpumpun Pengelolaan Aset di Lima DPSP secara luring di Hotel Grand Ambarrukmo, Yogyakarta. Diskusi tersebut dihadiri oleh Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Kemendagri, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara KemenPUPR, Kepala Biro Hukum Kemenko Marves, Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves, Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan Pemerintah Kabupaten Magelang, perwakilan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perwakilan PT. Aviasi Pariwisata Indonesia, dan perwakilan PT. Taman Wisata Candi.

Kegiatan kunjungan lapangan dan diskusi bertujuan untuk membahas mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dan payung hukum optimalisasi pemanfaatan aset KSPN di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

Adapun pokok-pokok pembahasan pada kegiatan kunjungan lapangan adalah sebagai berikut:

- a. permasalahan utama adalah aset KSPN yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR di lima DPSP belum dapat dikelola secara optimal. Hal ini mengakibatkan adanya penurunan kualitas dan kerusakan pada infrastruktur KSPN. Aset KSPN dengan nilai investasi besar perlu dikelola dan dimanfaatkan secara profesional dan berkelanjutan, sehingga dapat terhindar dari kerusakan dan vandalisme serta memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dan masyarakat;
- b. sebagai bagian dari BMN, terdapat dua opsi mekanisme pengelolaan aset KSPN, yakni (i) dikelola langsung oleh penerima aset atau (ii) dilaksanakan oleh mitra pengelola. Selanjutnya, pemanfaatan BMN/BMD yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemda, BUMN/BUMD, dan swasta dapat dilakukan melalui beberapa opsi mekanisme, yaitu (i) sewa, (ii) pinjam pakai, (iii) kerjasama pemanfaatan (KSP), (iv) bangun serah guna, atau (v) kerja sama penyediaan infrastruktur;
- c. secara umum, ketentuan mengenai pengelolaan BMN/BMD telah diatur pada (i) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (ii) PP 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/BMD, (iii) Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, dan (iv) Permenkeu No. 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN. Sementara itu, ketentuan mengenai pemanfaatan BMN/D diatur secara terpisah melalui Permendagri dan Permenkeu;
- d. namun demikian, pengaturan yang telah termuat dalam UU dan PP tersebut belum dapat mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan BMN/BMD dalam hal aset yang merupakan penunjang kepariwisataan. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai empat isu, yaitu (i) upaya optimalisasi aset di KSPN, (ii) definisi pengelolaan aset premium sesuai arahan Presiden, (iii) kebutuhan payung hukum pemanfaatan BMN/D aset penunjang pariwisata, dan (iv) biaya pemeliharaan aset selama masa transisi;

- e. pemanfaatan BMN melalui skema KSP memungkinkan pemanfaatan tanah dan bangunan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti BUMN/BUMD dan swasta. Adapun jangka waktu kerja sama tersebut adalah maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya, pembagian keuntungan dihitung dari (i) pendapatan/penjualan, (ii) laba sebelum bunga dan pajak, (iii) laba bersih, dan (iv) arus kas bersih kegiatan operasi dan investasi dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti (i) nilai investasi pemerintah, (ii) nilai investasi mitra KSP, dan (iii) kelayakan bisnis mitra;
- f. pemilihan mitra KSP dapat dilakukan melalui dua opsi yaitu tender dan penunjukan langsung. Untuk skema tender, calon mitra berstatus pemohon KSP dapat memperoleh beberapa kompensasi seperti tambahan nilai sebesar 10% dan pembelian prakarsa KSP termasuk HAKI yang menyertainya. Opsi penunjukan langsung hanya bisa dilakukan apabila mitra merupakan BUMN/BUMD atau anak perusahaannya dan dalam hal KSP memenuhi kriteria BMN bersifat khusus seperti (i) adanya spesifikasi tertentu, (ii) kompleksitas khusus, dan (iii) barang bersifat rahasia dalam pertahanan negara;
- g. sementara itu, mekanisme pemanfaatan BMN melalui skema pinjam pakai memiliki jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang. Namun demikian, pengelolaan aset KSPN dengan skema ini tidak memungkinkan adanya penerimaan/pembayaran dari pemanfaatan aset tersebut;
- h. hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ditjen Cipta Karya KemenPUPR pada 17 Mei 2022 mengenai pengelolaan dan progres serah terima BMN di KSPN menyatakan bahwa skema pengelolaan aset KSPN setelah proses serah terima mengerucut pada dua opsi yaitu kerja sama antara BUMN atau badan otorita pariwisata yang ditunjuk dengan pemda (calon penerima BMN/BMD);
- i. terkait opsi pengelolaan aset KSPN oleh badan otorita, masih diperlukan peraturan pendukung mengenai skema pengelolaan tersebut. Lebih lanjut, dibutuhkan pula pengalihan aset daerah ke Kemenparekraf melalui mekanisme hibah, dimana untuk BMD memerlukan persetujuan dari DPRD. Oleh sebab itu, perlu pembahasan lebih lanjut mengenai kebutuhan diskresi untuk (i) pengelolaan melalui Badan Otorita dan (ii) penganggaran biaya pemeliharaan pasca pembangunan sampai dengan infrastruktur diserahkan kepada Pemkab;
- j. biaya operasional dan pemeliharaan yang perlu dianggarkan pemda terdiri dari dua jenis yaitu: (i) biaya wajib, yang meliputi biaya personil (petugas kebersihan, petugas keamanan, dan

sebagainya) dan biaya non personil (alat dan bahan kebersihan, biaya listrik, air bersih, dan telepon, dan sebagainya) serta (ii) biaya tambahan untuk pemeliharaan atau perbaikan kerusakan; dan

- k. adapun perkiraan biaya yang perlu dianggarkan adalah maksimal 2% dari nilai perolehan atau dihitung dari kebutuhan operasional dan pengelolaan aset selama 1 tahun. Akan tetapi, aset KSPN yang merupakan aset infrastruktur premium membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan lebih dari 2% dari nilai perolehan. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat sehingga dapat memberikan dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat.

Adapun kesimpulan dan tindaklanjut dari hasil kunjungan lapangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kemenparekraf, Kemenkeu, Kemendagri, dan KemenPUPR agar menyusun definisi dan kriteria mengenai aset premium di lima DPSP sesuai arahan Presiden guna mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dan pemanfaatan BMN/BMD;
- b. Kemenkeu agar memastikan percepatan proses hibah aset KSPN di lima DPSP; dan
- c. Kemendagri agar melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan tersedianya anggaran pengelolaan dan pemanfaatan aset KSPN di lima DPSP pada APBD 2023; dan
- d. akan dilaksanakan pembahasan mengenai progres hibah, definisi dan kriteria aset premium, serta kebutuhan kebijakan atau payung hukum untuk pengelolaan dan pemanfaatan aset pada minggu ke-1 Oktober 2022.

10. Koordinasi Pengembangan Geopark

Permasalahan utama adalah belum optimalnya pengembangan Geopark di Indonesia untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Saat ini, anggaran pengelolaan UNESCO Global Geopark masih terbatas dan belum optimalnya peranan pemerintah daerah untuk mengelola kawasan strategis tersebut.

Indonesia menjadi negara dengan UNESCO Global Geopark terbanyak di Asia Tenggara. Saat ini, terdapat enam UNESCO Global Geopark yang tersebar di Sumatera Utara, Belitong, Jawa Barat, NTB, dan Bali. Tujuan utama adalah untuk mewujudkan pengembangan geopark sebagai destinasi berkelanjutan melalui

konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan Internasional Geopark Youth Forum 2022 secara daring yang dihadiri oleh perwakilan Kemenparekraf, KemenESDM, Kemenpora, Kemendikbudristek, KemenBUMN, Telkomsel, Pemprov Bali Pemkab Bangli, dan Sekretariat Indonesia Geopark Youth Forum. Rapat koordinasi bertujuan untuk membahas persiapan acara International Geopark Youth Forum. Acara ini akan berlangsung pada 13 – 17 September 2022 di kawasan Geopark Batur, Provinsi Bali.

Secara umum, acara ini merupakan momentum bagi para pemuda untuk terlibat lebih konkrit dalam penyusunan mandat filosofi UGGp dan pengumpulan komitmen sehingga terwujudnya masa depan yang berlandaskan pada pembangunan keberlanjutan di masing-masing geopark. Berkaitan dengan hal tersebut, acara ini akan menghasilkan Piagam Pemuda Batur yang merupakan ajang kesempatan para pemuda geopark di seluruh dunia untuk merancang kerangka kerjasama untuk aksi memitigasi dampak perubahan iklim di Kawasan Geopark.



Gambar 23. UGGp Youth Forum Seminar and Camp

Adapun butir-butir pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. KemenPPN telah mengirimkan surat kepada Bupati mengenai acara IGYF 2022 dan permohonan dukungan dengan melampirkan detail acara dan rundown kegiatan. Namun demikian, sampai saat ini KemenPPN belum menerima respon

- dari Pemkab Bangli;
2. Pemprov Bali mendukung pelaksanaan acara IGYF 2022 di Geopark Batur. Adapun dibutuhkan dukungan oleh Pemprov Bali terkait gala dinner dan transportasi yang dibutuhkan oleh para peserta delegasi. Oleh karena itu, usulan dukungan akan disampaikan ke Kepala Dinas Pariwisata Bali;
 2. Kemenparekraf mendukung pelaksanaan acara IGYF 2022 melalui perizinan dan publikasi. Sementara ini, Dit. Wisata Minat Khusus (WMK) akan memberikan dukungan promosi acara namun dibutuhkan konten-konten dari pihak penyelenggara sehingga konten publikasi akan menjadi lebih terarah. Lebih lanjut, Dit. WMK akan melakukan koordinasi apabila Menparekraf mengisi speech acara ini;
 3. Telkomsel menyampaikan jelang acara IGYF 2022, akan melakukan penambahan combat agar jaringan lebih optimal saat pelaksanaan acara. Lebih lanjut, Telkomsel akan melakukan pemantauan jaringan selama persiapan dan acara berlangsung. Selanjutnya, Panitia IGYF telah berkoordinasi dengan Telkom dan disampaikan bahwa akan mendukung melalui peningkatan sinyal wifi sebesar 100 Mbps di Museum Batur;
 4. Selain itu, KNIU akan melakukan koordinasi dengan tim internasional melalui tim keuangan untuk memfasilitasi acara makan siang. Adapun kebutuhan total peserta makan siang adalah 100 pax;
 5. Kemenpora akan melibatkan para pemuda peduli lingkungan Provinsi Bali untuk menyukseskan pelaksanaan acara ini. Selanjutnya, dibutuhkan surat resmi untuk memberikan informasi kepada komunitas pemuda di Bali. Lebih lanjut, Kemenpora akan berkoordinasi dengan Panitia IGYF 2022 terkait persiapan teknis acara ini.

Selain itu, dua Geopark Nasional yakni Merangin Jambi dan Raja Ampat akan melaksanakan kegiatan validasi aspiring UNESCO Global Geopark gelombang kedua pada Oktober 2022. Pada tahun ini, Indonesia kembali telah mengirimkan Letter of Intent kandidat aspiring UGGp 2022 yakni Geopark Karangsambung Karangbolong dan Geopark Meratus.

Adapun kesimpulan dan tindak lanjut dari hasil koordinasi pengembangan geopark adalah UNESCO Global Geopark Youth Forum akan melaksanakan acara 1st UNESCO Global Geopark Youth Forum Seminar and Camp pada 13 - 17 September 2022 di Batur UGGp. Acara akan menghasilkan Piagam Batur sebagai

bentuk komitmen para pemuda untuk penanganan perubahan iklim (*Youth for Climate Action in Geoparks*).

Sebagai tindak lanjut, KemenPPN bersama Pemprov Bali, Pemkab Bangli, dan Panitia IGYF 2022 akan meninjau kesiapan dan progres persiapan di lokasi. KemenPPN bersama Panitia IGYF 2022 agar melaksanakan audiensi dengan Bupati Bangli untuk membahas persiapan IGYF 2022 termasuk hal-hal yang dibutuhkan. Kemlu agar mendampingi Panitia IGYF 2022 untuk berkomunikasi dengan perwakilan negara untuk memaksimalkan kehadiran delegasi negara-negara sahabat dalam acara IGYF 2022. Panitia IGYF 2022 dan KemenPPN agar berkomunikasi dengan Kemenpora dan KemenBUMN untuk membahas dukungan kebutuhan penyelenggaraan kegiatan.

11. Koordinasi Pengembangan Geopark Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Pada 12 Juli 2022, telah disahkan PP 24/2022 tentang Ekraf dan mulai berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan. K/L memiliki waktu satu tahun untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PP 24 Tahun 2022. Telah dilaksanakan rapat koordinasi TL PP 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari KemenkumHAM, Kemenlu, Kemenparekraf, Kemenkominfo, Kemendikbudristek, OJK, BRIN, HIMBARA, dan para pelaku industri.

Rapat koordinasi bertujuan untuk membahas pemetaan isu prioritas yang perlu diselesaikan pada 2022 sebagai langkah strategis untuk kesiapan teknis pelaksanaan PP 24/2022. Sembilan agenda yang perlu diselesaikan sebelum diberlakukan pada 12 Juli 2023. Sembilan agenda tersebut antara lain:

1. penyiapan Platform Pendaftaran Penilai Kekayaan Intelektual (Pasal 12 ayat (3));
2. penyiapan sistem pencatatan fasilitas pembiayaan pelaku ekonomi kreatif (Pasal 13);
3. pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan dan Pemasaran (Pasal 37);
4. penyediaan akses data atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan (Pasal 11);
5. penyusunan regulasi terkait di sektor jasa keuangan;

6. peningkatan kompetensi profesi penilai kekayaan intelektual (Pasal 12 ayat (4));
7. penyiapan integrasi sistem elektronik antar Kementerian/Lembaga untuk mendukung pembiayaan dan pemasaran berbasis kekayaan intelektual (Pasal);
8. penyediaan Fasilitas Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual; dan
9. pemberian Insentif pada Pelaku Ekonomi Kreatif (Pasal 32 - 35)

Adapun kesimpulan dan tindaklanjut dari hasil koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lima agenda yang menjadi prioritas yang perlu diselesaikan pada 2022, antara lain:
 - i. prioritas pertama
 1. peningkatan kompetensi profesi penilai kekayaan intelektual (Pasal 12 ayat (4));
 2. penyediaan akses data atas kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan (Pasal 13); dan
 3. penyiapan sistem pencatatan fasilitas pendanaan pelaku ekonomi kreatif (Pasal 11); dan
 - ii. prioritas kedua
 1. penyusunan regulasi terkait di sektor jasa keuangan; dan
 2. Pemberian Insentif pada Pelaku Ekonomi Kreatif Pasal 32 – 35;

3.1.3 *Learn and Growth Perspective*

SS.8 Tersedianya SDM Yang Kompeten Di Deputi Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

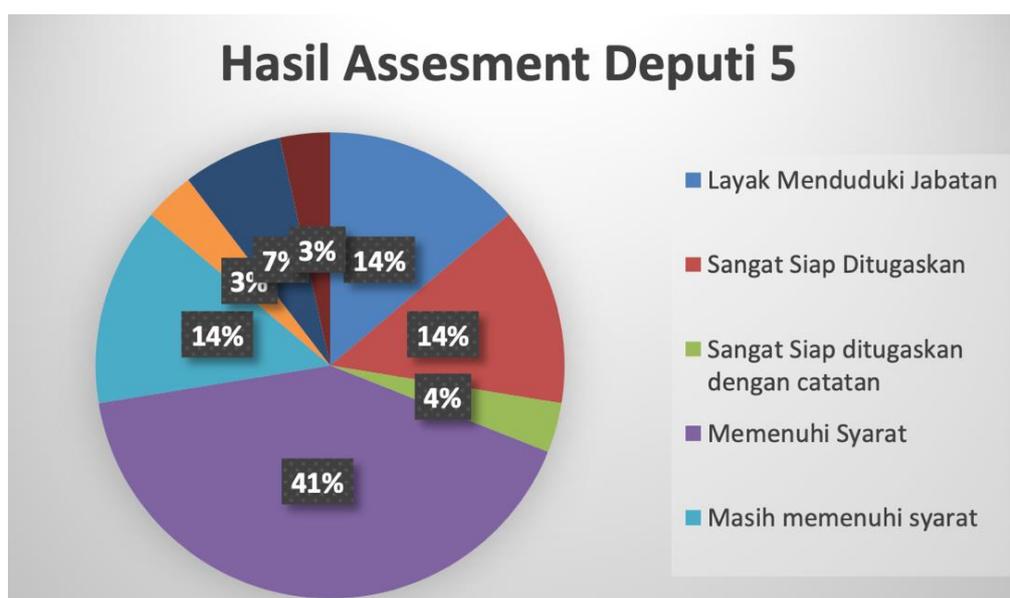
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten diperlukan dalam suatu organisasi agar dapat mampu melaksanakan tugas jabatannya. Untuk mengetahui SDM yang kompeten di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, telah dilakukan penilaian standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara (ASN). Standar yang dinilai meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Pengukuran kompetensi tersebut sudah mengikuti Peraturan Menteri PAN RB No 38 Tahun 2017.

Berdasarkan rekapitulasi dari hasil assessment yang dilakukan oleh Sekretariat Kementerian dari 29 (dua puluh Sembilan) pegawai di Deputi V mendapatkan nilai pada layak menduduk jabatan sebanyak 4 (empat),

sangat siap ditugaskan sebanyak 4 (empat), sangat siap ditugaskan dengan catatan sebanyak 1 (satu), memenuhi syarat 12 (dua belas), masih memenuhi syarat sebanyak 4 (empat), potensial sebanyak 1 (satu), cukup potensial sebanyak 2 (dua) dan belum layak menduduki jabatan sebanyak 1 (satu).

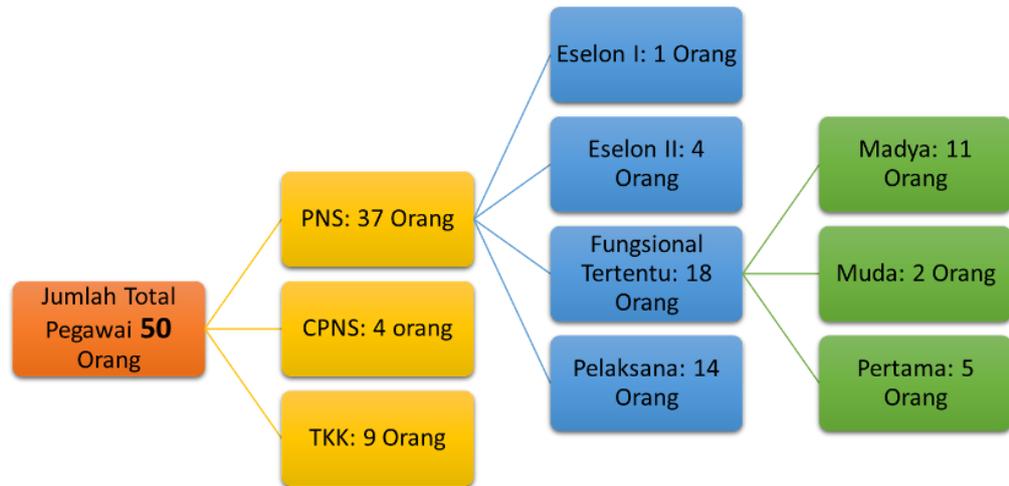
No	Nilai Assesment	Jumlah Pegawai
1	Layak menduduki jabatan	4
2	Sangat siap ditugaskan	4
3	Sangat siap ditugaskan dengan catatan	1
4	Memenuhi syarat	12
5	Masih memenuhi syarat	4
6	Potensial	1
7	Masih potensial	2
Total		29

Tabel 6. Nilai Assesment Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Gambar 24. Grafik Nilai Assesment Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sepanjang 2022, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah melakukan beberapa rotasi dan mutasi pegawai. Saat ini, jumlah pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebanyak 50 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1 orang Eselon I, 4 orang Eselon II, 18 orang jabatan fungsional, 14 orang pelaksana, 4 orang CPNS, dan 9 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).



Gambar 25. Rincian Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022

SS.9 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Reformasi birokrasi yang efektif hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut tentunya dilakukan di dalam program yang berada di Deputy Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif, terdapat 2 (dua) IKU di Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Deputy dan Nilai PMPRB Deputy.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan evaluasi penilaian bagi unit kerja dengan 3 (tiga) indikator, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sementara itu, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau disingkat PMPRB merupakan penilaian yang dilaksanakan oleh unit kerja dengan terpenuhinya dokumen reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

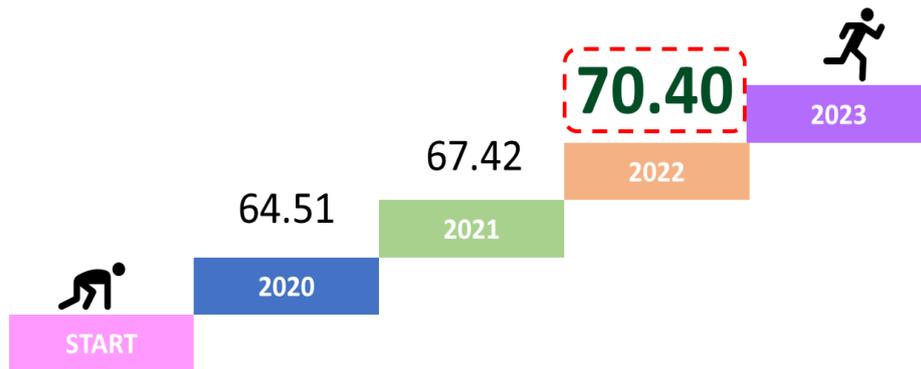


Gambar 26. Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil penilaian KemenPANRB dan Inspektorat Kemenko Marves Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan nilai SAKIP sebesar 70.40 atau dikategorikan “Baik” dan mendapatkan nilai PMPRB sebesar 32.77 atau sebesar 90.27%.

2020	2021	2022
D4 (34,13)	D2 (33,11)	D4 (33,82)
D2 (33,63)	SET (32,98)	D2 (33,58)
D1 (33,25)	D4 (32,80)	D6 (33,34)
D3 (32,83)	D6 (31,60)	SET (33,09)
D6 (32,29)	D3 (31,35)	D5 (32,77)
SET (32,25)	D5 (31,24)	D3 (32,66)
D5 (32,24)	D1 (30,26)	D1 (32,59)

Gambar 27. Perkembangan Penilaian PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Gambar 28. Perkembangan Penilaian SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SS.10 Terlaksananya Administrasi Keuangan Yang Akuntabel Di Deputy Bidang

Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel adalah salah satu target sasaran capaian di Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan rincian target yang dicapai adalah 60. Target sasaran ini dapat dilihat dari penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau disingkat IKPA.

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

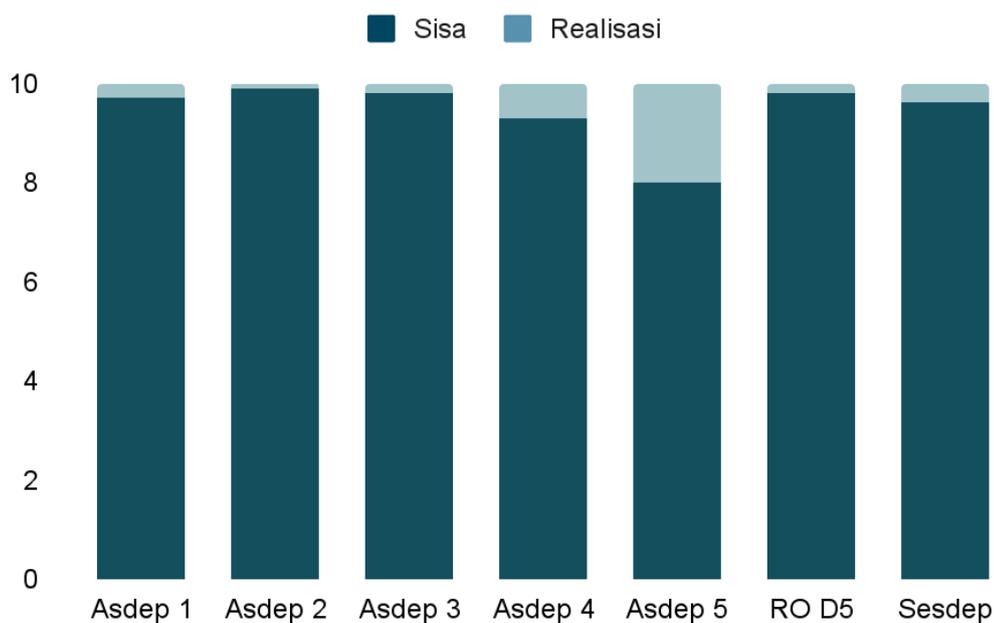
Pada 2022, Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretariat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: ND.017.4/SESMENKO.03/KU.02/I/2023 perihal Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022, Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendapatkan nilai IKPA sebesar 92.07.

No	Unit Kerja Eselon I	Nilai IKPA
1.	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	83,73
2.	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	86,54
3.	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	90,81
4.	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	91,85
5.	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	92,07
6.	Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	86,95
7.	Sekretariat Kementerian Koordinator	91,34

Gambar 29. Hasil Penilaian IKPA Unit Kerja Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan penyajian informasi tentang alokasi anggaran yang telah ditetapkan dan besaran nilai serta besaran persen yang telah dilakukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus didukung oleh penganggaran yang memadai dan sampai dengan bulan Desember 2022 realisasi anggaran yang didapatkan sebesar Rp 15.572.642.514 dengan nilai presentase 99,43%.



Gambar 30. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Deputi 5	15.661.698.000	15.572.642.514	89.055.486	99.43%
Asdep 1	2.116.326.000	2.110.405.318	5.920.682	99.7%
Asdep 2	2.088.741.000	2.087.156.990	1.584.010	99.9%
Asdep 3	1.773.360.000	1.770.289.889	3.070.111	99.8%
Asdep 4	1.746.603.000	1.717.226.263	29.376.737	98.3%
Asdep 5	1.716.133.000	1.682.097.440	34.035.560	98.0%
RO Deputi	4.290.803.000	4.282.699.860	8.103.140	99.8%
Sesdep	1.929.732.000	1.922.766.754	6.965.246	99.6%

Gambar 31. Rincian Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

BAB IV PENUTUP

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur berdasarkan capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perencanaan Kinerja ini disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam mencapai tujuannya, seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Marves telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diukur dengan indikator kinerja (IK) yang dirinci sesuai target sesuai waktu yang ditetapkan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama yang dibagi dalam 4 Perspektif.

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian 2022
<i>Stakeholder Perspective</i>						
SS.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	Nilai Devisa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	USD 3 M	USD 0,52 M	USD 4,26 M	142%
		Tingkat Kontribusi PDB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3%	2,4%	3,6%	120%
		Nilai Belanja Produk Dalam Negeri dari Kementerian/Lembaga dan Pemda	Rp400 T	N/A	Rp431,38 T	107,8%
<i>Customer Perspective</i>						
SS.2	Terwujudnya Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	Jumlah Tata Kelola Pariwisata	5	5	5	100%
SS.3	Terwujudnya Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif	5	4	5	100%
SS.4	Tingkat Ketersediaan Permodalan Industri Pariwisata dan Industri Kreatif	Nilai Penanaman Modal Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp30 T	33,405 T	Rp53,31 T	177,73%

SS.5	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tata Kelola Kekayaan Intelektual Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	N/A	3	100%
SS.6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Tata Kelola SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	N/A	5	100%
<i>Internal Business Process Perspective</i>						
SS.7	Efektifitas Rancangan Kebijakan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat Rancangan Kebijakan yang Ditindaklanjuti	70%	70%	70%	100%
<i>Learning and Growth Perspective</i>						
SS.8	Tersedianya SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat Kompetensi SDM Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	75%	97%	↓ 96, 50%	128,6%
SS.9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	70%	86,06%	90,27% ↑	128,9%
		Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputi	70	67,42	70,40 ↑	100,6%
SS.10	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi	90	94,60	↓ 90,72	100,8%

Tabel 7. Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2022

Sementara itu, dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus didukung oleh penganggaran yang memadai dan sampai dengan bulan Desember 2022 realisasi anggaran yang didapatkan sebesar Rp 15.572.642.514 dengan nilai presentase 99,43%.

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
Deputi 5	15.661.698.000	15.572.642.514	89.055.486	99.43%
Asdep 1	2.116.326.000	2.110.405.318	5.920.682	99.7%
Asdep 2	2.088.741.000	2.087.156.990	1.584.010	99.9%
Asdep 3	1.773.360.000	1.770.289.889	3.070.111	99.8%
Asdep 4	1.746.603.000	1.717.226.263	29.376.737	98.3%
Asdep 5	1.716.133.000	1.682.097.440	34.035.560	98.0%
RO Deputi	4.290.803.000	4.282.699.860	8.103.140	99.8%
Sesdep	1.929.732.000	1.922.766.754	6.965.246	99.6%

Gambar 32. Rincian Realisasi Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Selama 2022, berbagai upaya telah dilakukan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk efisiensi sumber daya, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi secara *online*, tercatat dalam sehari bisa dilakukan hingga 15 Rapat koordinasi dengan K/L.
2. Pengaturan jadwal penggunaan akun zoom secara terpusat, sehingga total Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hanya memiliki tiga akun zoom yang dapat digunakan secara maksimal. Hal ini cukup menghemat anggaran jika dibandingkan dengan unit lain yang masing-masing unit eselon 2 memiliki 1 akun zoom.
3. Jumlah pegawai Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jika dibandingkan dengan unit lain termasuk paling sedikit, namun dengan jumlah sedikit dapat menghasilkan output yang sama dengan unit lain.
4. Penyelenggaraan pelatihan/pengembangan kompetensi pegawai secara mandiri, baik secara *online* maupun *offline*.

BAB V DAFTAR PUSTAKA

KemenPANRB. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi*. Jakarta.

KemenPANRB. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Kemenko Marves. 2020. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman*. Jakarta.

Kemenko Marves. 2017. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman*. Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2020. *Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024*. Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2022. *Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta.

Kemenparekraf. 2022. *Laporan Infografis Perkembangan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara per Oktober 2022*. Jakarta.

BPS. 2022. *Laporan Tahunan Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Sektor Lapangan Usaha di Indonesia*. Jakarta.

Bank Indonesia. 2022. *Laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Oktober 2022*. Jakarta.

Kemeninvest/BKPM. 2022. *Laporan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing Triwulan IV Tahun 2022 berdasarkan Sektor Industri*. Jakarta.